

**SKRIPSI**

**MANAJEMEN PEMBINAAN USAHA PARIWISATA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**RISWAN DANI PUTRA**

Nomor Stambuk: 105610 4173 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PENGAJUAN JUDUL****MANAJEMEN PEMBINAAN USAHA PARIWISATA  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR****SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu  
Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh

**RISWAN DANI PUTRA**

105 610 417 311

23/04/2018

Yang  
Sub: Mumi

R/065/ADN/218  
PUT  
m

**PROGRAM STUDI ILMU ASMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Di  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Riswan dani Putra

Stambuk : 1056 1041 73 11

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Abdul Kadir adys, SH, M.M

  
Nurbiah Tahir, S.Sos, MAP

Diketahui Oleh:

Dekan  
Fisip Unismuh Makassar

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



  
Nasrul Haq, S.Sos, M.PA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/ Undangan Menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1327/FSP/A.1-VIII/93/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada Hari Senin 20 Agustus 2018

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si  
NID:0915057101

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.si  
NID:0031126801

### PENGUJI

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Abdul Kadir Adys, SH, MH
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Haerana, S.Sos, M.Pd

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## PERNYAYAAN KEASLIAN KARIA TULIS ILMIAH

Saya bertandatangan di bawah ini

Nama: Riswan Dani Putra

Nomor Stambuk: 105610417311

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik dan hukum positif yang berlaku di Negara ini.

Makassar 11 mei 2018

Yang menyatakan

Riswan Dani Putra

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu ...*

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan, kesempatan, rahmat dan rahimnya kepada seluruh manusia terlebih nikmat iman. Rasa syukur atas segala pemberian-Nya, kesabaran atas semua ujian yang diberikan-Nya yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada nabiullah Muhammad SAW. Sang pejuang dan pembawa kebenaran di tengah-tengah masyarakat sebagai rahmatan lilalamin dan suri tauladan yang baik bagi seluruh ummatnya. Semoga keselamatan dilimpahkan pula kepada seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Tidaklah mudah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, namun berkat usaha serta bantuan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan Akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Skripsi ini berupaya memberikan gambaran dan informasi tentang Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini, bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan awal dari semuanya, awal dari sebuah perjuangan hidup, dan awal dari sebuah do'a yang selalu menyertainya. Oleh Karena itu, penulis mengucapkan terima kasih:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Muhammad Danial, S.Pd, Rosmiati J. A.Mk dan adikku Risdianti yang tak hentinya memberi dukungan berupa moril maupun materil. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta dan kepercayaan yang terpancar serta do'a dan restu yang selalu mengiring tiap langkah penulis.
2. Kepada Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Kepada Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Kepada Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Kepada Abdul Kadir adys, SH, M.M\_ selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada Nurbiah Tahir, S,Sos, M.AP selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi.
7. Kepada HJ. Andi Nuraeni Aksa. SH., MH. Selaku Penasehat Akademik (PA)

8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan banyak pengetahuan di mulai dari semester awal hingga semester akhir.
9. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Kepada Kanda Fuadi SH telah membantu penyusunan Skripsi ini.
11. Semua Pembimbing Yang Telah Mengarahkan Untuk penyelesaian Skripsi ini
12. Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M). Sul-Sel yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian.
13. Kepada seluruh staf Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar telah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Seluruh teman-teman se-jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya Angkatan 2011 ( 9 Dewa) M. Taufik Hidayat, M. Iksan, Aabullah, muh. Hatta, Henrik, Rahmatullah yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini
15. Keluarga Besar KOMPAL SUL – SEL yang telah banyak membatu untuk penyelesaian skripsi ini dalam kebersamaan.
16. Keluarga Besar KIPAS BULO BATTI SELAYAR yang banyak memberi gagasan utuk penyelesaian skripsi ini.

17. Keluarga besar HPMKS- RAYA yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini
18. Kepada seluruh rekan-rekan HMI cabang makassar, HMI cabang Gowa Raya maupun teman-teman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
19. Kepada Sri Ayu Andhira yang telah rela memberiku motivasi baik moril maupun materil dalam penyelesaian Skripsi ini.
20. Kepada Andriani Yang begitu antusias memberiku semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih tersebut penulis hanya mampu untuk beribadah dan penuh harap kepada Allah SWT. Semoga dapat member manfaat bagi para pembaca maupun bagi diri pribadi penulis. Amin;

*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Makassar, 24 April 2018

Riswan Dani Putra

## PERNYAYAAN KEASLIAN KARIA TULIS ILMIAH

Saya bertandatangan di bawah ini

Nama: Riswan Dani Putra

Nomor Stambuk: 105610417311

Program Studi: Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik dan hukum positif yang berlaku di Negara ini.

Makassar 11 mei 2018

Yang menyatakan

Riswan Dani Putra

## ABSTRAK

**RISWAN DANI PUTRA. Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Selayar** (dibimbing oleh Abdul Kadir adys, SH, M.M, dan Nurbiah Tahir, S,Sos, M.AP)

Manajemen Pcmbinaan Usaha Pariwisata merupakan langkah untuk meningkatkan mutu usaha pariwisata baik barang maupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk menjelaskan dan dan menggambarkan tentang Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi terkait masalah yang diteliti, antara lain : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekertaris sub bagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Bidang destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Seksi Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Bidsng Pengembangan SDM dan kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Seksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen antara lain, observasi, dokumentasi dan dikembangkan dengan hasil wawancara terhadap informan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pembinaan usaha pariwisata di kabupaten kepulauan selayar dalam spek Planning sudah baik karena telah dibuatkan program pelatihan usaha dan pelatihan SDM, dan dibuatkan SOP serta pelaporan setiap program yang terlaksana, dari aspek Organization juga sudah baik, karena dalam pelaksanaan program sudah ada 2 (dua) bidang dan 2 (dua) seksi yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan program. Dari aspek Actuating juga sudah baik karena dalam implemntor dalam melaksanakan program selalu mengikuti mekanisme dan regulai yang ditetapkan. Dan dari aspek Controlling juga sudah baik karena telah dibuat tim terpadu untuk mengawasi manajemen pembinaan usaha pariwisata penerbitan TDUP dan Sertifikasi usaha.

*Kata Kunci: manajemen pembinaan usaha pariwisata, planning, organizing, actuating dan controlling*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Konsep dan teori .....	9
B. Kerangka Pikir .....	25
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian .....	26
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	28
C. Sumber Data .....	29
D. Informan Penelitian .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Teknik Analisis Data .....	31
G. Keabsahan Data .....	32
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian .....	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	51
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	97

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pariwisata Indonesia telah menjadi sektor strategis dalam sistem perekonomian Nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Negara Republik Indonesia, yang merupakan Negara yang memiliki potensi sumber daya Alam yang berlimpah, keanekaragaman hayati dan peninggalan sejarah/ budaya. Sumber Daya Alam yang berlimpah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketika sumber daya itu dapat di kelola dengan baik sesuai apa yang diminati masyarakat, sehingga pemanfaatan sumber daya Alam itu tidak akan menghabiskan waktu maupun materi akibat tidak berhasilannya dalam mengelola suatu sumber daya tersebut.

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan setiap obyek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata di suatu negara akan menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Mata rantai kegiatan yang terkait dengan industri pariwisata tersebut mampu menghasilkan devisa dan dapat pula digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan angka kesempatan kerja.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Bab VI pasal 14 ayat 1 usaha pariwisata meliputi kawasan pariwisata, dayatarik wisata, jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa makan minum, penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, kohonferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa preamuwisata, wisata tirta dan spa. Dan dalam pasal 3 Unadang- undang Nomor 10 Tahun 2009 juga di jelaskan bahwa kepariwisataan memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap weisatawan perjalanan dan rekreasi juga meningkatkan pendapatan Negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Menurut aturan menteri pariwisata Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata, bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 15 ayat 2 dalam Undang – Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan, hal ini perlu di tetapkan peraturan menteri pariwisata tentang pendaptaran usaha pariwisata. karna dengan adanya penetapan peraturan menteri ini Pembinaan Usaha Pariwisata secara optimal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut maka penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya Pembinaan usaha pariwisata.

Berdasarkan undang- undan Nomor 10 tahun 2009 tentang keparawisataan, yang didalamnya mengatur dan mengarahkan tentang penyelenggaraan keparawisataan di indonesia. Mandat yang sangat penting adalah diberikannya kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah,

baik provinsi maupun kabupaten kota. Dapat menetapkan rancanagn induk pembangunan parawisata sesuai kewenangannya. Sejalan dengan hal itu pemerintah kabupaten kepulauan selayar membentuk peraturan daererah ( PERDA) Nomor 7 tahun 2011 tentang rancangan induk pengembanga pariwisata dan peraturan daerah ( PERDA) no 8 tahun 2011 tentang pembinaan usaha parawisata guna mempercepat laju pembangunan di sektor keparawisataan.

Dilihat dari segi geologi selayar sangat berpeluang dijadika daerah wisata, hal ini menjadi peluang besar untuk melakukan terobosan dalam hal peningkatan ekonomi rakyat dan pendapatan asli daerah ( PAD ) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu pemerintah selaku implementor sudah semestinya menjadi ujung tombak pembangunan dan pengembangan daerahnya sendiri dalam memaksimalkan potensi yang ada, dengan melakukan pembinaan usaha pariwisata dengan menggunakan beberapa pendekatan implementasi kebijakan. Dengan begitu diharapkan adanya kemajuan dalam penyelenggaraan keparawisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pembinaan usaha pariwisata, perlu dipahami seperti hal-hal pokok Daya Tarik Wisata yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan Alam, Budaya, dan hasil buatan Manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan tujuan wisatawan. Adapun pihak menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraannya disebut Usaha Pariwisata. Sekumpulan

usaha yang saling berkorelasi dalam menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan itulah usaha pariwisata atau industri Pariwisata.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu daerah yang kaya akan objek wisata baik wisata Alam yang sangat menarik, wisata Budaya, dan Wisata Sejarah. Mengingat letaknya Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai posisi yang menguntungkan, yaitu sebagian besar wilayahnya adalah perairan dan secara geografis terletak di selatan pulau Sulawesi. Ini sangat menguntungkan jika di kelola secara masip. Kabupaten Kepulauan Selayar sejak 412 tahun yang lalu dan semenjak Indonesia merdeka 72 tahun, PERDA tentang pembinaan usaha pariwisata baru terbentuk sejak tahun 2011 yaitu peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang pembinaan usaha pariwisata. hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masi kurang memperhatikan pembinaan usaha pariwisata kabupaten kepulauan selayar, padahal ini merupakan komoditi yang akan meningkatkan pendapatan Daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat. peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang pembinaan usaha pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagaimana pada Bab II pasal 2 dicantumkan bahwa pengelolaan usaha pariwisata meliputi Daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa makan dan minum, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa peramuwisata, wisata tirta dan spa.

Pembinaan Usaha Pariwisata, tentu dimana dalam Struktur Birokrasi Dinas Pariwisata mempunyai bidang yang dimana bertugas dalam melakukan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dalam melakukan Pembinaan Usaha pariwisata yang ada di kabupaten selayar, pedoman Dinas pariwisata adalah perda Nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, susunan orgamosasi, Tugas dan Fungsi, serta tatakerja Dinas pariwisata.

Harapan pemerintah terkait perda nomor 8 tahun 2011 tentang pembinaan usaha pariwisata kabupaten kepulauan selayar yaitu agar dimana dalam menjadikan usaha pariwisata tersertifikasi, mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata TDUP, dan memajukan usaha pariwisata agar berdayasaing dengan daerah lain serta sudah siap menerima dalam melayani kebutuhan wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung keselayar. Dalam pembinaan usaha pariwisata Diselayar masi mendapt kendala dikarenakan kurang anggaran yang di Alokasikan Untuk kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Selayar, Pembinaan usaha pariwisata merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah Dinas pariwisata dan para pelaku usaha, karna masi kurangnya usaha pariwisata yang tersertifikasi dan masi jauh dari kelayakan sehingga selayar sampai saat ini masi kurang diminati oleh wisatawan. dengan pembinaan pariwisata diharapkan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menuju daerah kawasan wisata yang banyak di kunjungi wisatawan dalam maupun luar Negeri.

Observasi awal yang dilakukan oleh penulis melihat pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum begitu serius dalam perencanaan usaha pariwisata, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan. pembinaan merupakan sebuah proses dari kebijakan yang begitu kompleks, bahkan tidak jarang pelaksanaan pembinaan mengalami kendala yang dikarenakan anggaran yang dialokasikan begitu minim dalam kegiatan pembinaan usaha pariwisata yang ada. Serta pemangku kepentingan belum begitu sigap sehingga para pengusaha pariwisata tidak berpartisipasi secara aktif dalam mengikuti pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, selain itu kurangnya Pengawasan pendataan, sosialisasi, dan sertifikasi dari Dinas Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga mengakibatkan usaha pariwisata berjalan stagnan.

Padahal dengan adanya instrumen perizinan tersebut pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan usaha baik yang berbadan hukum atau perorangan, padahal pemberian izin itu dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan umum dan memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis begitu tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar”***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakan permasalahan di atas maka dalam studi ini diarahkan untuk mencapai tujuan dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana perencanaan pembinaan usaha pariwisata di kabupaten kepulauan selayar?
2. Bagaimana pengorganisasian pembinaan usaha pariwisata di kabupaten kepulauan selayar?
3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar?
4. Bagaimana pengawasan pembinaan usaha pariwisata di kabupaten selayar?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan pembinaan usaha pariwisata di kabupaten kepulauan selayar?
2. Untuk mengetahui pengorganisasian pembinaan usaha pariwisata di kabupaten kepulauan selayar?
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar?
4. Untuk mengetahui pengawasan pembinaan usaha pariwisata di kabupaten selayar?

## D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

### 1. Akademis

Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagaimana suatu karya ilmiah yang kemudian dapat menunjang laju perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan masukan yang kemudian dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

### 2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan dan juga pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah, khususnya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya pengembangan kepariwisata.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Konsep dan Teori

##### 1. Pengertian Manajemen Pariwisata

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, "Manage" yang memiliki arti mengelola/mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan untuk melihat totalitas di bagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan gambaran tentang visi. Seni manajemen mencakup kemampuan komunikasi visi tersebut. Aspek-aspek perencanaan kepemimpinan, komunikasi dan pengambilan keputusan mengenai unsur manusia tentang cara menggunakan pendekatan manajemen seni.

Secara umum pengertian manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan. Manajemen dapat dikatakan sebagai seni.

Silalahi (1991:17). Manajemen berasal dari kata "to manage", yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Dalam arti singular (tunggal) disebut : Manajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya aktivitas-aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan bantuan orang lain. Di Indonesia kata "management" (inggris) ini diterjemahkan dalam berbagai istilah, seperti kepemimpinan, tata pimpinan, ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan, dan lain sebagainya.

G.R. Terry dalam Handayani (1996:20), *Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utility in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives.* Manajemen adalah suatu proses yang membedakan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Terry juga menganggap manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni. Seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

## 2. Pengertian Pembinaan Pariwisata

Pariwisata merupakan fenomena global, telah menjadi sebuah kebutuhan mendasar yang dimana melibatkan ratusan manusia. Kebutuhan dasar sudah seharusnya berwisata adalah bagian dari hak asasi manusia, yang harus di hormati dan dilindungi. Dari hal ini sebagian organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, world tourism organization WTO, mengakui bahwa pariwisata adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dimana menyangkut kegiatan sosial dan juga ekonomi. Pariwisata dimana diartikan secara sederhana sebagai perjalanan hanya untuk bersenang – senang, namun ditinjau secara etimologi pariwisata merupakan dari bahasa sangsekerta yang dimana terdiri dari tiga suku kata, “ pari” diartikan banyak, penuh, berkali-kali, “wis/ man” diartikan ruma proporti, kampung, komunitas dan “Ata” diartikan pergi terus menerus, mengembara. Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas berarti pariwisata adalah bepergian sepenuhnya, meninggalkan rumahnya, kampung halamannya,tempat tinggalnya. Istilah pariwisata sendiri di indonesia mulai dikenal pada tahun 1960 yang dimana merupakan sebuah usulan presiden Soekarno kepada Sultan Hameng Kubono IX selaku pada saat itu menjabat Dewan Touriseme Indonesia (DTI).

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan berasal dari kata pauer (kekuasaan atau keberdayaan) karena itu ide utamanya pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan

seringkali di korelasikan dengan kemampuan Individu untuk membuat individu melakukan apa yang di inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pembinaan secara etimologi berasal dari bina, pembinaan adalah proses, pembuatan, pembaharuan usaha, dan tindakan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal-hal yang bersifat efektif dan pragmatis dalam arti agar dapat memberikan pemecahan persoalan yang di hadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasari fakta-fakta yang ada yang dimana sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat agar dapat di terapkan dalam praktek.

Menuru peraturan menteri Pariwisata Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 dalam pasal 32 ayat 2 antara lain pembinaan adalah berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata, dari apa yang kemudian apa yang ada dalam aturam permen ini adalah dimana tatacara pembinaan usaha pariwisata itu berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha pariwisata kedepannya yang berkelanjutan.

(Tim pembuat Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1996:134). Sedangkan pembinaan adalah tindakan usaha dalam kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna untuk hasil lebih baik.

Pengertian pembinaan menurut psikologi, dapat diartikan sebagai pe memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan itu dilakukan dengan maksud supaya program atau kegiatan yang dilaksanakang selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan.

Widjaja,(1988).pembinaan merupakan sebuah proses juga pengembangan urutan-urutan yang mencakup pengertian, diawali dengan menumbuhkan, mendirikan, memelihara pertumbuhan tersebut yang juga disertai dengan usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Menurut fathoni (2006:7) mengatakan bahwa Manajemen dapat dikatakan Pembinaan,pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan, yang merupakan proses kegairahan agar mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut George Terry dalam sukarna (2011 :10) ada terdapat 4 fungsi manajemen/pembinaan, yaitu dengan adanya planning (perencanaan), dengan adanya organizing (pengorganisasian), dengan adanya actuating (pelaksanaan), dan juga controlling (pengawasan)

Mathis (2002:112), pembinaan merupakan sutu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini juga terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Mathis (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan yang pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

- a. Mengatur strategi. Ialah manajer-manajer SDM dan pembinaan harus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen yaitu untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
- b. Merencanakan, ialah perencanaan harus terjadi bersama dengan tujuan, untuk menghadirkan pembina yang nantinya akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk mengkresek efektivitas pembinaan.
- c. Mengorganisasi, ialah pembinaan harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan nantinya akan dilakukan, dan juga mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
- d. Memberi pbenaran ialah mengukur juga mengevaluasi pada tingkat yang mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahan -kesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

Mangkunegara (2005:76) juga menjelaskan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan sebagai berikut: Tujuan juga sasaran

pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat diukur, Para pembina yang profesional, Materi pembinaan dan pengembangan juga harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, dan juga Peserta pembinaan dan pengembangan tentu harus memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Ivancevich (2008:46), pembinaan sebagai usaha meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaan sekarang atau dalam pekerjaan yang lain yang akan dijabatnya segera. Selanjutnya Ivancevich (2008 :46) juga mengatakan sejumlah poin penting, pembinaan merupakan sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan juga berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan agar pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

(Musaneff,1991:11). Pembinaan merupakan proses penggunaan manusia, waktu , uang, alat peralatan, metode, dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya. Dalam pembinaan menunjukkan suatu peningkatan kemajuan, atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur pengertian pembinaan merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan perbaikan atas sesuatu, istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur

manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia

Menurut Sadoko Isono dalam hariadi (2001:14) pembinaan merupakan proses mengerjakan keahlian dan memberikan pengetahuan yang perlu dan sikap agar mereka melaksanakan tanggungjawab sesuai standar yang telah ditentukan.

Menurut Masdar halim, pembinaan adalah segala hal usaha, ikhtiar dalam kegiatan yang dimana berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa yang kemudian diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik secara psikis maupun mental. Disini peran pembinaan sangat diperlukan agar merefresh kondisi psikis dan mental seseorang agar supaya tidak mengalami yang dinamakan depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan efisien dan efektif.

Menurut Made Pidarta (2001:68) pembinaan merupakan suatu proses pembimbingan kepada kariawan dan personalia perusahaan yang lain mengenai produk untuk memperbaiki situasi hasil kerja agar produk dapat secara efektif dengan prestasi yang akan semakin meningkat.

Menurut Hidayat, S (1979: 10) bahwa Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan dengan tindakan-tindakan,

pembimbingan, pengarahan, pengembangan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.

Widjaja (2000:14) menyatakan bahwasanya pembinaan itu merupakan suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan membutuhkan, mendirikan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam tujuan.

Menurut Pamudji (1985:7) bahwa Pembinaan itu berasal dari kata "bina" yang berarti sama halnya dengan "bangun", jadi pembinaan itu dapat diartikan sebagai kegunaan yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Pembinaan juga mengandung bermakna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan serangkaian usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.

Berdasarkan beberapa defenisi dan pengertian pembinaan maka dapat ditrik kesimpulan bahwa dimana pembinaan adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan supaya dapat mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya-sumberdaya yang lainnya dengan efektif dan efisien.

### 3. Pengertian Usaha Pariwisata

Usaha pariwisata merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa usaha pariwisata atau menyediakan/mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang berhubungan dengan bidang tersebut. Objek dan daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang menjadi saranwisata dengan kata lain adalah usaha penyelenggaraan usaha seni arena permainan, pertunjukan, karaoke, dan kegiatan hiburan serta rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Usaha pariwisata secara menyeluruh dapat bisa dikatakan industri pariwisata, tetapi tidak di ibaratkan sebagai pabrik yang harus mengolah barang mentah menjadi barang jadi, serta ada produknya. Industri pariwisata ialah semua usaha-usaha yang dapat dinikmati semua wisatawan sejak awal mulai proses ketertarikan untuk berwisata, dan menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai atau berujung pada proses akhir wisatawan tersebut pulang dan menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian mengingannya.

Menurut Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, Industri Pariwisata merupakan sekumpulan usaha pariwisata yang saling berkorelasi dalam menghasilkan barang dan/ atau jasa sebagai bagi pemenuhan kebutuhan para wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Menurut peraturan menteri Nomor 1 tahun 2016, usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan juga jasa bagi pemenuhan kebutuhan para wisatawan dan juga penyelenggara pariwisata.

Menurut perda Nomor 8 Tahun 2011, usaha pariwisata adalah setiap usaha atau kegiatan di dalam bidang perekonomian yang dimana dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Dalam peraturan menteri dan perda selayar bahwa usaha pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dimana dalam aktifitasnya bergerak dalam bidang perekonomian dan menghasilkan keuntungan atau laba dari aktifitas kegiatan yang dilakukan, sementara itu berbeda dengan pendapat dari ahli sebagai berikut.

Nyoman s. Pandit ( 2003:33) pariwisata dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan, atau perbaikan pelabuhan dan jalan- jalan raya, pengangkutan setempat, pilot proyek sarana budaya, program kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Karyono (1997:15) pariwisata adalah serangkaian aktivitas manusia yang dimana baik di wilayah Negara sendiri maupun Negara lain. Lanjut Karyono mendefinisikan industri pariwisata sebagai keseluruhan dari berbagai jenis macam bidang usaha, secara bersama-sama untuk menghasilkan produk-produk maupun jasa-jasa/ layanan-layanan atau services, yang baik secara langsung atau tidak dibutuhkan oleh para wisatawan selama perawatannya.

E. Guyer freuler dalam Yoti (1996:115) pariwisata dalam artian moderen adalah phenomena dari jaman sekarang yang kemudian disadrkan diatas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar juga menumbuhkan cinta kepada estetika alam dan pada khususnya ditambahkan pergaulan dari berbagai bangsa dan jenis kelas masyarakat sebagai hasil daripada perkembangan perniagaan, industri perdagangan dan penyempurnaan darpada alat alat pengakuan.

W. Hunzieker (yoeti 1994:38) industri pariwisata merupakan semua macam jenis usaha yang terdiri dari kegiatan produksi barang dan jasa yang nantinya di perlukan oleh para wisatawan.

Menurut Damarji( yoti, 1996:154) industri pariwisata adalah rangkuman dari berbagai bidang usaha yang bersama-sama menghasilkan produk-produk dan servic yang nantinya secara lansung akan dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.

GA. Schmol dalam bukunya *tourism Promotion* (yoti, 1985:143) idustri pariwisata lebih condong berorentasi dengan menganalisa cara-cara melakukan pemasaran promosi hasil produk industri pariwisata. industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, tetapi industri yang terdiri dari serangakauan perusahaan yang menghasilkan jasa-jasa dan barang barang yang berada satu dan yang lainnya.

Perbedaan itu bukanlah hanya jasa yang dihasilkan melainkan besarnya perusahaan, lokasi maupun tempat kedudukan, letak secara

geografis, fungsi, bentuk organisasi yang mengelola dan metode permasalahannya.

**a. Fungsi industri pariwisata**

Industri pariwisata juga mempunyai fungsi yang amat penting untuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mempunyai fungsi sebagai suatu pendorong bagi pembangunan daerah, memperbesar atau meningkatkan pendapatan Nasional dalam menyongsong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, mempertahankan kebudayaan Nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkokoh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa. Sehubungan dengan itu diperlu adanya langkah-langkah yang pengaturan dan mampu mewujudkan keterpaduan kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, juga memelihara kelestarian dan mendorong peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata

**b. Ciri – ciri produksi usaha pariwisata**

1. Tidak dapat disimpan

Barang dan juga jasa yang di hasilkan perusahaan pariwisata bersifat mudah rusak dan juga tidak dapat disimpan untuk kemudian digunakan atau dijual kembali keesokan harinya

2. Tidak dapat dipundahkan

Wisatawan atau pengguna barang dan juga jasa parawisata tidak dapat membawa produk wisata kepada wisatawan tetapi wisatawan itu sendiri yang mengunjungi dan datang sendiri untuk menikmati produk wisata itu, misalnya keindahan taman Nasional Taka Bonerate wisatawan harus mengunjungi ke objek wisata tersebut

### 3. Perproduksi

Produksi dan juga proses konsumsi berlangsung bersamaan wisatawan yang akan menikmati produksi wisata harus ke tempat proses produksi yang sedang berlangsung tanpa adanya wisatawan yang mempergunakan jasa-jasa itu tidak akan terjadi produksi

### 4. Tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif

Karena dibuat untuk memenuhi keinginan wisatawan yang beragam, pada umumnya produk wisata dijual dengan beraneka ragam dimana produk wisata memiliki keragaman harga dan jenis yang ditentukan bermacam-macam faktor seperti: musim dan status sosial pembeli

### 5. Wisatawan tidak dapat mencicipi produksi wisata

Wisatawan harus datang sendiri ke tempat proses produksi barang dan juga jasa parawisata, sehingga mereka tidak mengetahui kondisi produk karna hanya mengetahui kondisi produk dari brosur dan media promosi lainnya

### 6. Pengelolaan produk wisata mengandung resiko besar

Usaha pariwisata membutuhkan investasi yang begitu sangat besar dan di lain sisi permintaan begitu sangat peka terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan juga sikap masyarakat. Dan dari perubahan tersebut menimbulkan kurangnya permintaan hal ini terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan goyahnya sendi investasi

#### **B. Indikator pembinaan usaha pariwisata**

Indikator adalah alat utama dan paling penting, yang digunakan dalam mengukur keberhasilan atau kebenaran sesuatu, adapun defenisi dan pengertian yang di ungkapkan oleh para pakar adalah sebagai berikut:

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia KBBI indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan sebuah petunjuk atau keterangan.

Green, (1992) indikator merupakan variabel –variabel yang bisa menunjukan ataupun mengindikasikan terhadap penggunanya mengenai sesuatu tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi.

WHO, (1981) Indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Wilson dan Sapanuchart (1993) indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi.

Depertemen Kesehatan, Pendidikan, Dan Kesejahteraan Amerika Serikat (1969) indikator adalah statistik dari hal normatif yang menjadi

perhatian kita yang dapat membantu kita dalam membuat penilaian ringkasan, komprehensif, dan berimbang terhadap kondisi atau aspek- aspek penting dari suatu Masyarakat.

Dari uraian penjelasan diatas dapat kita tarik sebuah kesimpulan terkait indikator indikator adalah Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, namun lebih sering hanya sebagai pemberi petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan tersebut sebagai suatu pendugaan.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini terkait pembinaan usaha pariwisata adalah teori dari George R. Terry

a. Planning (perencanaan)

Perencanaan adalah proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan (Usman, 2006: 48). Pada hakikatnya perencanaan adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara-cara akan dilaksanakan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. (Usman, 2009).

Dalam penyusunan perencanaan hendaknya tercakup apa (what) yang akan di capai, bagaimana (how) akan dilaksanakan, siapa (who) yang akan melaksanakan (Widjaja, 1987: 9). Jadi, perencanaan dalam manajemen penyelenggaraan itu perlu dilakukan, yaitu menjadi patokan dalam melaksanakan kegiatan.

b. Organising ( pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu (R. Terry, 2000: 9). Atau kata lain Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif (Hasibuan, 2000: 22)

Dalam sistem kerja sama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, siapa yang bertanggung jawab atas siapa, dan memfokuskan sumber daya pada tujuan (Fattah, 1996: 71). Jadi, pengorganisasian berarti menetapkan sistem organisasi yang dianut organisasi dan mengadakan distribusi kerja agar mempermudah perealisasi tujuan (Siswanto, 2005: 24).

c. Aktueting (pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah mencakup inisiasi dan pengarahan tindakan-tindakan-tindakan tersebut seperti digariskan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan rencana-rencana, sistem-sistem, prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan (Winardi, 1990: 9). Terdapat pula pendapat actuating merupakan suatu seni dan penerapannya secara berhasil tergantung dari pemikiran yang intensif. Karena banyaknya hubungan dengan unsur manusia, banyak sarjana beranggapan bahwa berhasil tidaknya actuating ini tergantung pada masalah "pemberian motif (motivating)" pada anggota organisasi bahkan ada pula yang beranggapan bahwa masalah pergerakan organisasi adalah masalah motivating (Hasibuan, 2001: 16).

Oleh karena itu, tindakan perencanaan serta pengorganisasian belum memberikan hasil yang maksimal, sebelum pemimpin melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaannya (Winardi, 1990: 91).

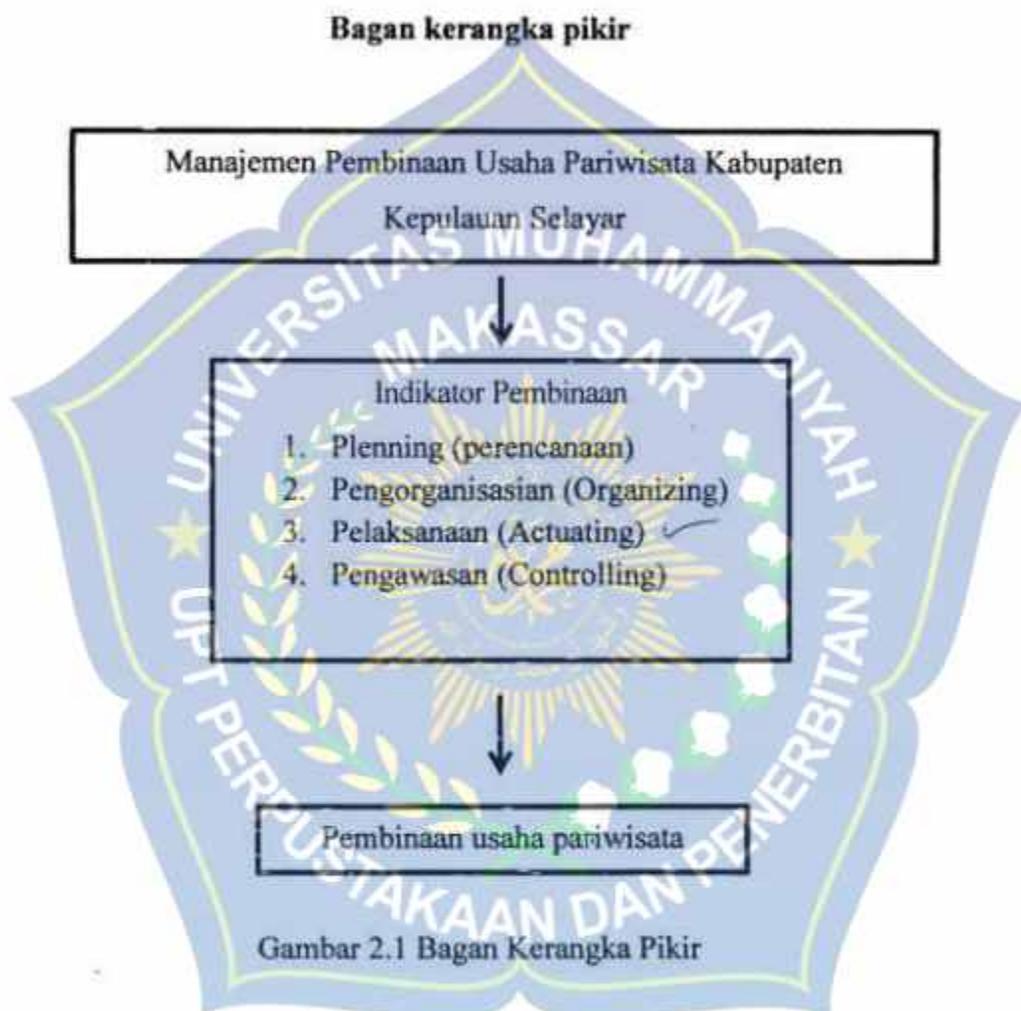
d. Controlling (pengawasan)

Pengawasan adalah suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui (Siswanto, 2005: 4). Apabila hasil pekerjaan menyimpang dari standar-standar yang berlaku, perlu di lakukan tindakan-tindakan korektif untuk memperbaikinya (Winadi, 1990)

Jadi, pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali (Usman, 2006: 400).

**C. Kerangka Pikir**

Tantangan dalam pembinaan usaha pariwisata bukan hanya menciptakan usaha pariwisata sebagai penarik keuntungan, tetapi bagaimana nilai-nilai pembinaan usaha pariwisata dapat di terapkan dalam pelaksanaannya. untuk melihat Pembinaan Usaha Pariwisata dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir antara sebagai berikut:



#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan saya lakukan di Dines Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat di sebagai berikut ini:

1. Plenning (perencanaan)
2. Pengorganisasian (Organizing)
3. Pelaksanaan (Actuating)
4. Pengawasan (Controlling)

## E. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias data yang di ambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang penulisan karya tulis ilmiah ini, maka akan diberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. **Planning (Perencanaan)** dapat diartikan proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. **Organising (pengorganisasian)** dapat dikatakan mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu
3. **Actueting (pelaksanaan)** dapat diartikan mencakup inisiasi dan pengarahan tindakan-tindakan tersebut seperti digariskan dalam kebijakan-kebijaksanaan, rencana-rencana, sistem-sistem, prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan
4. **Controlling (pengawasan)** dapat diartikan sebagai suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui
5. **Pembinaan Usaha Pariwisata** dapat diartikan peroses membangun atau perbaikan kualitas usaha baik barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan wisatawan dan menarik keuntungan atau laba.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung dalam kurung waktu 2 bulan setelah ujian proposal, dari 5 Mei sampai 26 Juni 2018. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Dines Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun pertimbangan dalam pemilihan lokasi karena pemerintah terkait mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan manajemen pembinaan usaha pariwisata.

##### B. Jenis dan Tipe Penelitian

###### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana didalam penelitian ini yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk menemukan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami pembinaan Usaha Pariwisata Dines pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

###### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan apa yang saat ini sedang berlaku. dimana didalamnya ada upaya mendeskripsikan, analisis mencatat, dan menginterpretasikan kondisi saat ini terjadi. penelitian deskriptif dengan kata lain bertujuan agar dapat memperoleh

informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan juga melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. penelitian tidak menggunakan hipotesa, hanya mendeskripsikan informasi dengan apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Tentang Pembinaan Usaha Pariwisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

### C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak, terkait yang memahami dan mengetahui persis kondisi lapangan saat itu, data biasanya bisa berupa informasi kejadian, berkas-berkas penting, foto, media cetak ataupun pengetahuan umum mengenai pembinaan usaha pariwisata di kabupaten kepulauan selayar.

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian melalui informan yang diambil dari Pimpinan dan staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, data primer disebut juga data asli atau data pokok. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dapat melakukan observasi, atau pengamatan langsung dilapangan, diskusi fokus, dan wawancara langsung dengan narasumber yang terkait.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan Peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai pihak kedua) data sekunder dapat diperoleh melalui pegawai dinas pariwisata, jurnal, laporan dan buku-buku ilmiah.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak terkait dan yang paham serta berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, serta dapat memberikan penjelasan tentang sikap, proses yang menjadi latar penelitian yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata hotel di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel 3.1**  
Daftar nama-nama informan

NO	NAMA	INESIAL	JABATAN	KET
1	Andi Abdulrahman, S.E. M.Si	AB	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar	1 Orang
2	Nuriadin, S.T	NR	Sekretaris sub bagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan	1 Orang
3	Rismawaty, A,Md	RM	Bidang destinasi pariwisata	1 Orang
4	Arung	AR	Seksi Pengembangan Industri Pariwisata	1 Orang
5	Mahrizal, S.IP	MZ	Bidang Pengembangan SDM dan kelembagaan	1 Orang
6	Sri Nurnaningsih Y, SS., M.M	SN	Seksi peningkatan kapasitas sumber daya manusia	1 Orang
<b>Jumlah</b>				<b>6</b>

Tabel 1.2 : Jumlah informan

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi (Pengamatan)

Metode yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung dan dijawab secara langsung. Wawancara dilakukan tanpa daftar pertanyaan yang disusun dan dilakukan dengan bebas namun yang dilakukan dengan pengumpulan data ini adalah wawancara secara mendalam yaitu pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap topik yang diteliti.

### 3. Dokumentasi.

Dokumentasi merupakan tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data sebagai pendukung dan pelengkap penelitian. Data yang diambil berasal dari Dinas Informasi, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sebagaimana oleh Miles dan Huberman bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data tersebut adalah :

### 1. Data Reduction (reduksi data)

Reduksi data adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses Reduksi Data adalah merupakan suatu pemilihan dalam suatu penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan lapangan.

### 2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan melihat penyajian-penyajian kita memahami yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

### 3. Konclusion (Kesimpulan)

Menarik kesimpulan adalah memulai mencari data dengan mencari arti benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibatnya dan proposisi. Temuan dapat berupa gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas dan perlu untuk di deskripsikan, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, yaitu mendeskripsikan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung di lapangan.

## G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi bermakna silang dengan mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

### 1. Triangulasi sumber

Peneliti dalam hal ini melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informan sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dan hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen.

### 2. Triangulasi metode

Untuk menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya. Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara dengan observasi dan dokumen. Apabila dari ketiga teknik kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar Cuma sudut pandang yang berbeda.

### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data penelitian yang kredibilitas, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masi segar, belum banyak masala, maka akan memberikan data yang lebih vailid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian

kredibel data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dan wawancara, observasi dan dokumentasi dalam waktu dan situasi yang berbeda.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Dan Objek Penelitian

Gambaran umum lokasi dan objek penelitian begitu sangat penting untuk memperjelas dan mengenal lokasi objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka Bab IV menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut dengan gambaran umum penelitian diantaranya adalah sebagai berikut: sejarah singkat Kabupaten Kepulauan Selayarga, gambaran umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, letak Geografis, dan gambaran umum Dines Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

##### 1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah Kota Benteng. Adapun luas Kabupaten ini ialah sebesar 10.503,69 km<sup>2</sup> (wilayah daratan dan laut) dan memiliki penduduk ±134.000 jiwa. Sementara Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 (dua) sub area wilayah daratan terdiri dari Kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Bontomatenne, Bontosikuyu dan Buki. Dan wilayah Kepulauan yaitu Kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Taka bonerate, Pasimarannu dan Pasilambena.

Padamasa lampau Selayar pernah menjadi rute pusat perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dan para pedagang singgah mengisi perbekalan sambil menunggu Musim yang baik untuk berlayar, dari aktivitas inilah muncul

nama Selayar. sementara nama selayar itu sendiri merupakan kata Cedaya (Bahasa Sangsekerta) berarti Satu Layar, karna banyaknya perahu yang memiliki satu layar yang melintas dan juga singgah di pulau ini. Sedangkan kita lihat kata Cedaya telah diabadikan kedalam Kitab Negara Kartagama yang dikarang oleh Empuh Prapanca pada abad 14. Bahwa pada pertengahan abad ke 14, pada saat itu Majapahit di Pimpin oleh Hayam Wuruk yang memiliki gelar Rajasanegara, Selayar digolongkan kedalam Nusantara, adalah pulau-pulau lain yang diluar pulau jawa yang ada dibawah kekuasaan Majapahit. Berarti armada Gajah Mada atau Laksamana pernah menepi atau singgah di pulau ini (selayar).

Lani dari itu pulau ini dinamakan Pulau Tana Doang yang berarti tana untuk berdoa. Pulau selayar di pasa lalu pernah dijadikan tempat berdoa pula bagi para pelaut yang hendak melakukan pelayaran baik kebarat maupun ketimur yang bertujuan untuk meminta keselamatan dalam pelayarannya. Selain itu dalam hukum pelayaran dan perdagangan Aman Gappa (abad 17), selaya disebut sebagai tujuan niaga sebab letaknya yang strategis untuk transit baik menuju ke timur maupun ke barat. Disebutkan dalam naska bahwa bagi orang yang berlayar dari Makassar, Malaka dan Johor sewanya 6 ( enam ) real per satu orang.

Belanda masuk dan memulai memerintah di Selayar yaitu pada Tahun 1739. Dan selayar ditempatkan sebagai kerisedenan dan dimana residen pertama ialah W. Coutsier memerintah dari tahun 1739 - 1743. Selanjutnya Selayar diperintah oleh Orang Belanda selama 87 Residen, dan pada Residen 88 barulah

yang memerintah orang selayar yang bernama Mochammad Oepoe Patta Boendoe. Tidak lama masuklah penjajahan Jepang sehingga jabatan Residen harus berganti menjadi Gunjo Sodai pada Tahun 1942. Zaman kolonial belanda, jabatan pemerintahan di bawa keresidenan ialah Reganschappen.

Reganschappen merupakan sebuah Wilayah setingkat kecamatan yang dimana dikepalai oleh peribumi yang memiliki gelar "Opu". Pada saat itu ada 10 (Rengschappen saat itu, dimana adalah rengschappen (aiyolo, buki, tanete, bontobangung, gantarang, barang-barang. Kemudian lanjut dari itu dibawah rengscape membawahi pemerintahan dengan nama Opu Lolo, gallarang dan balegau.

Setelah itu pada tanggal 29 November 1945 (19 hari setelah insiden Hotel Yamato di Surabaya) pada jam 06:45 beberapa kumpulan pemuda dari beberapa kelompok yang berkisaran kurang lebih 200 Orang dipimpin seorang pemuda yang bernama Rauf Rahman memasuki kantor Polisi Kolonial Belanda yang dimana tempatnya sekarang adalah ( kantor PD. Berdikari ). dan pada saat itu Pemuda yang berjumlah 200 Orang tersebut mengambil alih kekuasaan dari Belanda dan bersamaan pada hari itu diangkatlah Hari Lahir Kabupaten Selayar pada saat itu. Dan Tahun dimana Hari Jadi diambil dari Tahun Masuknya Islam di Kabupate Kepulauan Selayar yang dibawah oleh Datuk Ribandang, ditandai dengan masuknya Islam Raja Gantarang (Pangali Patta Radja) yang kemudian bernama dengan Sultan Alauddin, yaitu pemberiang datuk ribandang. Peristiwa

atau kejadian itu jatuh pada tahun 1605, dan sehingga ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Selayar pada tahun 29 November 1605.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan saka satu Kabupaten yang ada di dalam Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan peraturan Undang- Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) kemudian berubah nama dengan nama Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdasarkan PP, No 59 tahun 2008.

Kabupaten Kepulauan Selayar secara Geografis satusatunya Kabupaten yang seluruh daratannya terpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan, dan berada disebelah selatan Pulau Sulawesi. Selayar yang lebih akrab di juluki “ Tana Doang” yang dimana diartikan “Tanah untuk Berdoa” merupakan sebuah wilayah Kepulauan yang terdiri 130 gugusan pulau, baik yang ukurannya besar maupun yang kecil. Yang dimana pulaunya terhampar dari Utara ke Selatan, dimana diantara gugusan pulau-pulau tersebut terdapat 14 gugusan Karang atol Terbesar ketiga Dunia.

## **2. Gambaran Umum Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar**

Berubahnya bentuk Pemerintahan Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar yang dipimpin seorang pejabat yang bernama Bupati, sebenarnya hal tersebut bukan merupakan kondisi final dari perjuangan Masyarakat dan Pemerinta selayar, melainkan hal ini merupakan babak baru sistem pemerintahan yang dimana terusw bergumal mencari identitas diri dalam pembaharuan struktur

baik dimana menyangkut struktur maupun sistem pemerintahan dan juga sistem perpolitikan di tingkat Nasional maupun lokal yang terus memberi warna di setiap dinamika dan juga tahap perkembangan di kemudian hari.

Setelah terbentuknya daerah tingkat II yang sesuai dengan Undang-Undang No 29 tahun 1959, dimana kita lihat Selayar secara Adaptable berusaha menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan sebagaimana peraturan yang dimana berlaku di saat itu. Maksudnya adalah berkaitan dengan itu sistem pemerintahan Demokrasi Liberal menjadi sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, mengharuskan upaya penyesuaian. Perubahan ini pada dasarnya berlandaskan konstitusional yakni Undang-Undang no 29 tahun 1969, sebagai penegasan Undang-undang No. 1 tahun 1957, sementara undang – undang ini merupakan penjabaran implementatif pasal 31 dan 32 UUD 1950,

Semenjak terjadinya perubahan sistem pemerintahan demokrasi liberal ke Demokrasi Terpimpin, maka pada saat yang sama UUD ini tidak berlaku lagi. Sejak diberlakukannya UUD 1945 melalui dekrit persiden 5 juni 1959. Perubahan ditingkat pusat ini berpengaruh pada proses penyelenggaraan di Daerah-Daerah. Perubahan sistem ditetapkan melalui panpres No 6 tahun 1959 yang mengatur tentang pemerintahan daerah yang disempurnakan. Meskipun demikian, hal mengenai penyelenggaraan di bidang urusan rumah tangga daerah dan tugas perbantuan dalam pemerintahan, tetap dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan lama yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 Sebagaimana halnya daerah lain, Kabupaten Selayar sesuai dengan Panpres tersebut struktur

pemerintahan daerahnya terdiri atas kepala daerah dan DPRD (sebelumnya DPRD dan DPD).

Maksudnya, bahwa pada saat ini DPD dihapus dan digantikan dengan lembaga bernama Badan Pemerintah Harian (BPH). Pada operasionalnya, lembaga yang baru dibentuk yakni Badan Pembantu Harian (BPH) ini bertindak sebagai pelaksana tugas membantu kepala daerah. Dalam operasionalnya, Panpres No. 6 Tahun 1959 ini didasarkan atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mengenai struktur pemerintahan dan tugas kepala daerah, yang ditetapkan dalam Pasal 1 dan 2 Panpres No. 6 Tahun 1959 adalah: (1) pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (2) dalam menjalankan tugasnya kepala daerah dibantu oleh BPH. Anggota BPH adalah pembantu-pembantu kepala daerah sebagaimana menteri-menteri negara pembantu presiden.

Menurut sistem UUD 1945. Kemudian menyangkut kedudukan dan fungsi kepala daerah, juga dijelaskan menurut Pasal 14 Panpres No. 6 Tahun 1959, sebagai berikut: Ayat (1) kedudukan kepala daerah, (a) alat pemerintah pusat, (b) alat pemerintah daerah; (2) sebagaimana alat pemerintah pusat, kepala daerah bertugas: (a) mengurus ketertiban dan keamanan umum daerah, (b) menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan perintah daerah; (3) melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah di daerahnya termasuk di sini mempertanggungjawabkan keputusan DPRD-nya (Panpres No. 6 Tahun 1959).

Perubahan lainnya yang terjadi terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Selayar, yakni pembubaran distrik lama. Sekedar digambarkan kembali bahwa sebelumnya terdapat sebanyak 17 Distrik di Selayar (wilayah daratan dan kepulauan). Proses pembubaran atas distrik-distrik tersebut mengacu pada Radiogram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 16 Agustus 1961 No. 1/2/45, bersama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Selayar tertanggal 19 November 1961 No. 213/up/1961, sekaligus sebagai realisasi dari surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Bila mengacu pada nama-nama Gubernur yang pernah menjabat di Provinsi Sulawesi Selatan, maka radiogram Gubernur yang dimaksud terkait dengan pembubaran distrik adalah Gubernur Brigjen Rivai yang memerintah sejak tahun 1960 hingga tahun 1966. Demikian pula mengenai keputusan Bupati yang dimaksud sebagai realisasi surat edaran Gubernur menyangkut pembubaran distrik, tentu saja adalah pada masa jabatan Andi Matja Amirullah (Bupati pertama Kabupaten Selayar) yang memerintah sejak 4 Maret 1960 hingga 10 April 1965.

Perubahan sistem pemerintahan di Selayar yang ditandai oleh pembubaran distrik, kemudian diiringi oleh pembentukan beberapa Kecamatan dan membawahi Desa. Hal ini terjadi pasca penyerahan pemerintahan kepada daerah otonom tingkat II dalam wilayah Sulawesi Selatan (Undang-Undang No. 18 Tahun 1965). Terbentuknya Kabupaten daerah tingkat II Selayar dan selanjutnya dibentuk Kecamatan Kecamatan, berdasar pada Surat Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan No. 450/XII/1965 tentang Pedoman Pembentukan Desa Gaya Baru dan Kecamatan Bekas Distrik-Distrik.

**Tabel 4.1**

Nama- Nama Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar(Tahun 1956- 2018)

No	Nama Bupati	Periode
1.	Patta Tjora	1965
2	A. H. Dg. Marimba	1965- 1968
3	Abdul Rauf Rahman	1969- 1971
4	Andi Palioi	1971- 1974
5	Anas Achmad	1975- 1983
6	Ismail	1984-1989
7	Zaina/ Arifin Kammi	1989- 1994
8	H. M. Akib Patta	1994-1999
9	H. M. Akib Patta	1999- 2004
10	H. A. Syamsul Alam Mallarangeng	2004- 2005
11	H. Syahrir Wahab	2005- 2010
12	H. Syahrir Wahyab	2010- 2016
13	Muhammad Basli Ali	2016- Sekarang

Sumber : wekopedia.org 2017 dan dikelola oleh penulis 2018

### 3. Letak Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar

Kabupaten kepulauan selayar adalah sala satu dari 24 kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang dimana letaknya di bagian ujung selatan pulau Sulawesi dan memanjang dari utara ke selatan. Dimana daerah ini merupakan satu satunya daerah di provinsi sulawsi selatan yang seluruh daratannya terpisa dari pulau sulawesi, dan dimana terdiri dari beberapa gugusn pulau, secara keseluruhan ada 130 pulau, dan 7 diantaranya tidak terlihat pada saat air laut Pasang. Dimana luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 1,557,03Km<sup>2</sup> daratan(12,91%) dan 9,146,66 Km<sup>2</sup> lautan atau air (87,09%).

Tabel 4.2

Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Pasimarannu	176,35
2	Pasilambena	102,99
3	Pasimasunggu	114,05
4	Pasimasunggu Timur	47,93
5	Takabonerate	221,07
6	Bonti Sikuyu	199,11
7	Bontoharu	129,75
8	Beemteng	7,12
9	Bontomanai	115,56
10	Bontomatenne	159,92
11	Buki	82,73

Sumber: Selayar Dalam Angka BPS 2016 dan Dikelolah oleh Penulis Tahun 2018.

Secara geografis Kabupaten Kepulaun Selayar terletak antara 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30" Bujur Timur. Berbatasan dengan

abupaten Bulukumba disebelah utara, Laut Flores sebelah timur. Laut Flores sebelah selatan dan Selat Makassar di sebelah barat. Secara geografis Kabupaten Kepulauan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bulukumba
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
- c. Sebelah Timur : Laut Flores
- d. Sebelah Barat : Laut Flores dan selat Makassar

**Gambar 4.1**  
Peta Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017



Sumber: Wikipedia.org Tahun 2017 dikelola penulis 2018

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari 11 Kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan. Sebanyak 5 kecamatan berada di kepulauan, dengan 36 desa dan 6 kecamatan berada di daratan Pulau Selayar, dengan 45 desa serta 7 kelurahan.

#### 4. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Kepariwisataan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kepariwisataan merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dalam Perbup Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut: Pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas Kepariwisataan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Adapun Visi dan Misi Dinas Kepariwisataan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kepariwisataan dan salah satu pelaku pembangunan Kepariwisataan daerah merumuskan visi sebagai berikut "Menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Destinasi Pariwisata Bahari Unggulan Sulawesi Selatan". Visi tersebut memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, guna memberikan fokus terhadap program yang dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penguatan sinergitas lembaga dan peran serta masyarakat dalam pengembang kepariwisataan
- b) Membangun kawasan pengembangan pariwisata juga jaringan informasi dan promosi pemasaran.
- c) Menggambarkan kebudayaan daerah dan hasil hasil budaya yang menggambarkan sejarah daerah kabupaten selayar.

**a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Berdasarkan Undang Undang No 9 Tahun 2010 tentang kepariwisataan dan perda No 12 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimana tercatat pada pasal 8 huruf r, dan pasal 32 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas pariwisata ditetapkan sebagai berikut. Antara lain:

1. Tugas pokok

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan
- e. melaksanakan fungsilain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dines pariwisata, maka dibentuk Dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris terdiri dari: sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian hukum dan perencanaan, sub bagian keuangan.
- c. Bidang distinasi pariwisata terdiri dari: seksi pengembangan dayatarik wisata, seksi perencanaan destenasi, dan investasi pariwisata, seksi pembangunan industri pariwisata.
- d. Bidang pemasaran pariwisata antara lain: seksi promosi pariwisata, seksis analisis data daan pengembangan pasar, seksi pengembangan event pariwisata.
- e. Bidang SDM dan kelembagaan pariwisata: seksi peningkatan kapasitas SDM pariwisata, seksi peningkatan kerjasama kelembaga pariwisata, seksi pemberdayaan peran serta masyarakat pariwisata.
- f. Bidang pengembangan ekonomi kreatif : seksi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK, Seksi ekonomi kreatif berbasis senibudaya seksi pengembangan sarana dan prasarana kreatif.
- g. Kelompok jabatan fungsion

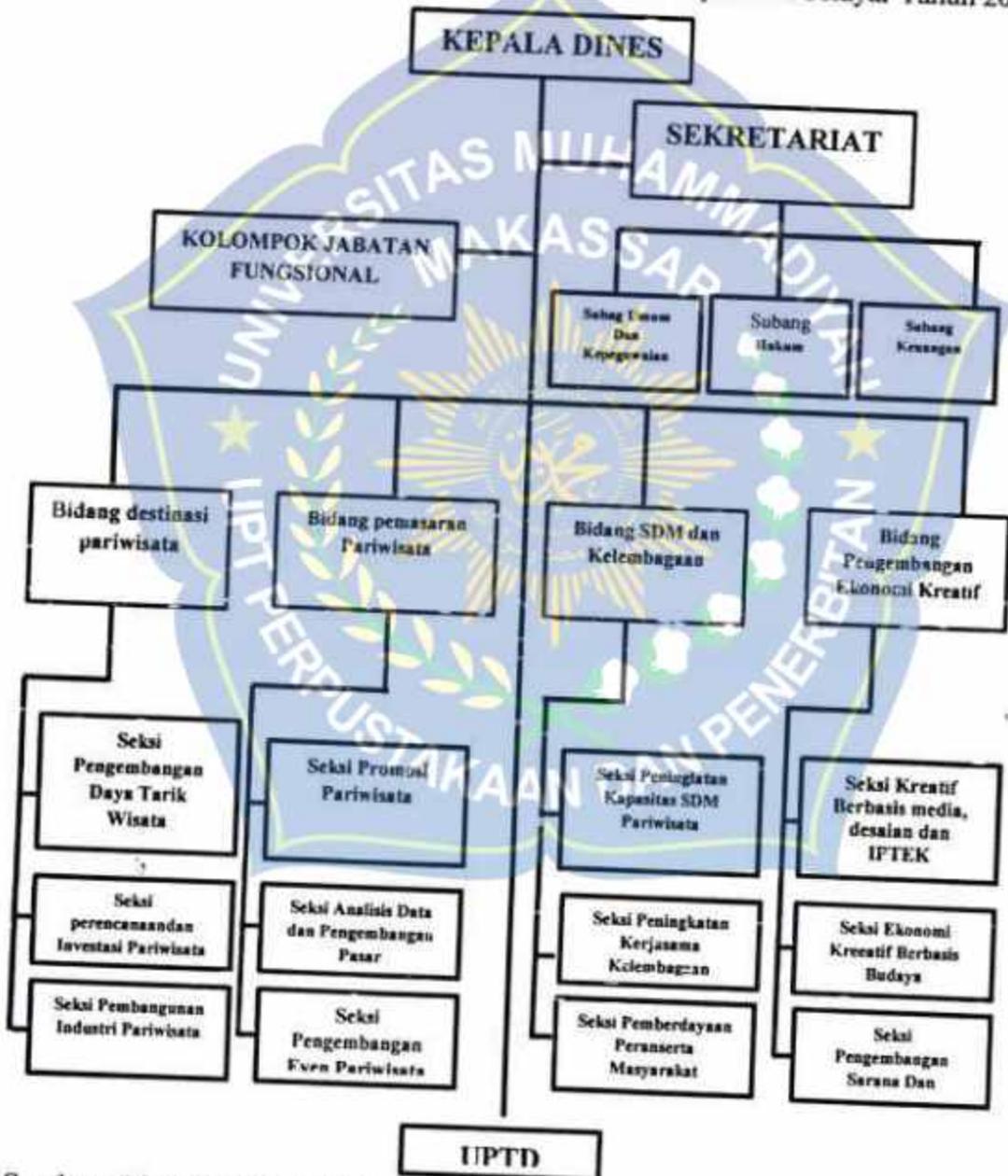
Dimana kita ketahui Dinas Pariwisata merupakan lembaga teknis di daerah yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pemerintah daerah melalui Dines

Kepariwisataan berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan melalui peraturan perundang-undangan. Selain dari itu dimana Dinas Pariwisata mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan informasi kepariwisataan perlindungan hukum, dan keamanan serta keselamatan bagi wisatawan.
- b. Menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.
- c. Memlihara, mengembangkan dan melestarikan aset Nasional yang menjadi daya tarik Wisata, dan aset potensial yang belum tergali.
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kewisataan dalam hal mencegah dan mengulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dari tugas dan fungsi diatas selanjutnya dapat dilihat Struktur dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 4.2 bwrikut:

**Gambar 4.2**  
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018



Sumber : Dines Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 2018

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Kabupaten Kepulauan Selayar dirancang dan diajukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tujuan sebagai pedoman dalam pengembangan pariwisata daerah. Dinas Pariwisata secara otomatis mempunyai andil besar dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Jumlah pegawai serta staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar selaku instansi yang melaksanakan kebijakan dapat kita lihat pada uraian berikut ini:

**Tabel 4.3**

Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 2018

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon IV	13 Orang
2	Eselon III	5 Orang
3	Pejabat Eselon II	1 Orang
4	Staf PNS	36 Orang
5	Staf PTT	62 Orang
6	Staf Sukarela	2 Orang
Jumlah		119 Orang

Sumber : Dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 2018 dan dikelola oleh penulis 2018.

**b. Bidang usaha pariwisata yang ada di selayar 2016**

**Tabel 4,4**

bidang usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Bidang usaha	Jumlah usaha	Lokasi
1	Daya Tarik Wisata	2 Usaha	Bonetappalang, Baloyya
2	Penyediaan Akomodasi	9 usaha	Bonetappalang, baloyya, Benteng
3	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	4 usaha	Benteng
4	Jasa Perjalanan wisata	4 usaha	Benteng
5	Wisata Tirta	3 usaha	Benteng
6	Jasa Makanan dan Minuman	13 usaha	Benteng

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar daan dikelola oleh penulis 2018

**B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Hasil penelitian adalah keseluruhan hasil apa yang didapatkan dari observasi dan pengumpulan Data yang dimana menjadi penunjang penelitian tersebut. Berhubungan dengan hal tersebut maka akan menguraikan dan menjelaskan 4 (empat) hal tersebut yang dimana menjadi kerangka pemikiran penelitian tentang Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, diantaranya adalah sebagai berikut : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (menggerakkan) dan Controlling ( mengawasi ). Dari ke 4 (empat ) indikator diatas dapat kita lihat bagaimana manajemen pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan Dines pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata yang dimana merupakan hal yang sangat krusial dalam usaha pariwisata, sebab Manajemen Pembinaan usaha pariwisata dilakukan agar dimana para pengusaha memahami peraturan dan agar dapat memperbaiki manajemen usaha yang dimiliki, dan mendapatkan tanda daftar usaha dan sertifikasi usaha, sehingga pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkatkan Kepariwisataannya di Daerah dan mendapatkan PAD yang tinggi dari sebelumnya.

Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisataannya Nasional. Sumber potensi Kepariwisataannya Baik yang berupa objek dan daya tarik wisata, kekayaan Alam, Budaya, dan sumber daya Manusia, merupakan modal dasar untuk meningkatkan usaha pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. modal dasar tersebut harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan pendapatan daerah (PAD), dan Kemakmuran Rakyat, Memperluas lapangan kerja, mendorong perkembangan Daerah, dan memupuk rasa cinta Budaya bangsa dan Tana Air.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. karena peraturan Daerah Telah ditetapkan Dan Disahkan dan Diberlakukan pada tanggal 28 Oktober 2011 maka kebijakan

tersebut mesti dan harus di terapkan untuk dapat mencapai tujuan utama tersebut dibuat.

Penulis menggunakan pendekatan fungsi manajemen Teori George R. Terry dalam melihat pelaksanaan perda No 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam Teori George R. Terry dijelaskan bahwa ada 4 (empat) hal dalam manajemen pembinaan usaha pariwisata, dimana ke 4 (empat) itu adalah sebagai berikut : Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (menggerakkan) dan Controlling ( mengawasi ). Dari ke 4 (empat ) indikator diatas dapat kita lihat bagaimana pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan Dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### **1. Planning (Perencanaan) Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Pada hakekatnya perencanaan merupakan penentuan sebuah tujuan utama bersama cara-cara untuk menentukan tujuan tersebut. Dimana dalam kepariwisataan perencanaan tidak terlepas dari segala aspek yang dimana berhubungan dengan pariwisata, dengan demikian perencanaan kepariwisataan mencakup seluruh jaringan yang berkaitan pariwisata yang dimana diantaranya adalah kalangan pemerintah (vertikal maupun horisontal), para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat umum.

Perencanaan begitu penting dalam pembinaan usaha pariwisata, hal ini dikarenakan perencanaan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen pembinaan usaha pariwisata, sebagai sarana untuk menerawan atau memprediksikan yang dimana akan timbul kemungkinan diluar dugaan sekaligus merupakan alternatif untuk pemecahannya. Dimana sebagai sarana untuk menggerakkan penyelenggara pariwisata sehingga mencapai tujuannya, dimana mewujudkan usaha pariwisata secara efektif dan efisien, dan juga sebagai barometer tingkat keberhasilan usaha pariwisata sebagai upaya pengawasan dan evaluasi dalam hal memberikan feedback atau umpan balik terhadap penyelenggara selanjutnya.

Pelaksanaan Perda No 8 tahun 2011 tentang Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Instansi yang kemudian di tujukan Perda ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana peran Dinas pariwisata sebagai birokrasi yang menjalankan kebijakan Pembinaan Usaha Pariwisata tersebut.

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Selayar dalam urusan bidang Pariwisata yang dimana sesuai peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan dimana menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain dalam hal pemberian Izin usaha pariwisata, mengingat fungsi utama pemberian Izin Usaha Pariwisata adalah untuk dapat mengadakan Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelayanan kepada Masyarakat. Dengan peraturan

daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk mendapatkan Izin dalam menjalankan usaha juga diatur kewajiban pemegang izin dalam menjalankan usahanya..

Peran Dinas Pariwisata sebagai birokrasi yang dimana dalam menjalankan kebijakan perda No 8 tahun 2011 guna akan mempermudah Pembinaan Usaha Pariwisata, tentu dimana dalam Struktur Birokrasi Dinas Pariwisata tentu mempunyai bidang yang dimana bertugas dalam melakukan kordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain dalam melakukan Pembinaan Usaha pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar

Menurut George R. terry dalam (Sukarna 2011: 10) mengemukakan perencanaan dalam manajemen Pembinaan itu memiliki beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu perencanaan harus Specific artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya, Measurable artinya preogram kerja atau rencana dapat di ukur tingkat keberhasilannya, Achievable artinya dapat dicapai. jadi bukan angan-angan, Realistic artinya sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang ada. Dan Time artinya ada batas waktu yang jelas sehingga mudah dinilai dan dievaluasi.

Perencanaan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalm manajemen Pembinaan Usah Pariwisata, sebab perencanaan yang baik akan memudahkan untuk memenuhi aturan administrasi yang berkenaan dengan pembinaan usaha pariwisata. inilah sebagai barometer dari keberhasilan atau tidaknya suatu program dalm meningkatkan usaha pariwisata. Pelaksanaan

manajemen Pembinaan usaha pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar kiranya memiliki perencanaan dalam tujuan agar pelaksanaan manajemen pembinaan usaha pariwisata tidak mengalami kesulitan dan akan tepat sasaran. Hal ini akan membuat pelaksana tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tujuan dari apa yang telah direncanakan yang berkaitan dengan manajemen pembinaan usaha pariwisata tersebut.

Pelaksanaan manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten kepulauan selayar kiranya memiliki perencanaan dengan tujuan agar pelaksanaan itu tepat sasaran. Hal tersebut tidak akan membuat implementor atau pelaksana mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut

Dalam perencanaan terdapat 4 komponen yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut: .

a. Perumusan tujuan

Perumusan tujuan ialah merupakan sebuah komponen yang memiliki fungsi yang sangat penting karena merupakan pengikat segala aktivitas stecholder dalam sistem kegiatan dalam mencapai tujuan. Perumusan tujuan ialah suatu pernyataan yang bersifat kualitatif berkenaan dengan pencapaian yang diinginkan dari hasil kebijakan atau keputusan, yang menjadi pedoman dalam tindakan yang sesuai.

Meskipun tujuan bersifat abstrak, tujuan jelas sangat berbeda dengan aspirasi yang merupakan konsep abstrak pada tingkat paling tinggi yang dikaitkan dengan apa yang di inginkan dalam jangka waktu yang begitu sangat panjang.

Penulis melakukan Wawancara terkait manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata pada aspek perencanaan (planning), berikut pemaparannya:

*"Dines Pariwisata melakukan perencanaan akan menjadikan selayar sebagai ikon wisata unggulan di sulawesi selatan dan bertujuan agar semua atau 70% usaha pariwisata harus kita sertivikasi sehingga selayar menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK)" ( AB, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 13 Mei 2018 )*

Berdasarkan Informasi yang didapat dari Informan yang dilakukan Dines Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, merencanakan selayar akan menjadi ikon wisata di Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan berbagai macam kegiatan pariwisata yang dimana berkaitan dengan pembinaan usaha pariwisata yang bertujuan agar usaha pariwisata selayar dapat di sertivikasi. Sehingga akan menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pendapat yang senada didapat oleh penulis dari Informan yang di wawancarai bersangkutan dengan manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata yang berkorelasi dengan perencanaan (planning), hasil yang diperoleh sebagai berikut:

*"Dalam melaksanakan kegiatan mengenai Pembinaan Usaha Pariwisata kami merencanakan pelatihan usaha dan pelatihan SDM, perancangan SOP dan juga Pelaporan tertulis bertujuan agar dimana usaha pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dapat TDUP dan di sertifikasi" ( NR, Sekertaris sub bagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 13 Mei 2018 )*

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari informan bahwa dalam pelaksanaan manajemen pembinaan usaha pariwisata juga mempersiapkan pelatihan yang terpisah antara kelompok usaha dan sumber daya manusia SDM yang tersertifikasi, dan disetiap pembinaan dibuat SOP dan pelaporan tertulis tujuannya adalah agar usaha pariwisata lebih bermutu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang berwisata ke Kabupaten Kepulauan Selayar

Dari dua hasil wawancara yang diperoleh penulis dari informan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata dalam melakukan perencanaan akan menjadikan Selayar sebagai ikon wisata di Provinsi Sulawesi Selatan serta berusaha agar 70% usaha yang ada itu tersertifikasi, Dinas pariwisata juga merencanakan Pelatihan usaha, Pelatihan SDM, disetiap pembinaan dibuat SOP dan pelaporan tertulis yang dengan harapan agar Kabupaten Kepulauan Selayar siap menerima kedatangan para wisatawan dan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

b. Pemilihan program

Pilihan program ialah dapat diartikan meliputi materi maupun kegiatan atau upaya yang akan dilaksanakan. Pemilihan materi harus searah dengan tujuan yang ingin dicapai, yang terkait tentang kegiatan pembinaan sehingga antara materi dan kegiatan saling berkesinambungan.

Penulis melakukan wawancara terkait manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata pada aspek perencanaan (planning), berikut pemaparannya:

*"dalam melakukan pembinaan usaha kami punya beberapa program yaitu pelatihan pemandu wisata, pelayanan hotel dan restoran dan pelatihan sertifikasi usaha " (SN, Bidang Pemasaran pariwisata Dinas pariwisata kabupaten kepulauan selayar, 13 mei 2018)*

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari informan bahwa Dinas pariwisata dalam melakukan pembinaan usaha ada beberapa program yang kemudian dilakukan seperti Pelatihan usaha pariwisata, pelatihan kariawan hotel dan restoran dan pelatihan sertifikasi usaha,

Pendapat yang senada didapat oleh penulis padasaat melakukan wawancara dengan informan lain terkait manajern Pembinaan Usaha Pariwisata dalam aspek perencanaan, berikut pemaparannya:

*"Dalam Pembinaan Usaha Pariwisata kami melakukan pelatihan dan sertifikasi usaha yang dilaksanakan selama 3 hari, kami libatkan semua jenis usaha dengan harapan agar meningkatkan standar mutu pelayanan wisata dan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di daerah ini" (MZ, Bidang Pengembangan Kemitraan dan SDM Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 13 mei 2018)*

Informasi yang didapat penulis dimana informan menyatakan bahwa setiap pembinaan usaha pariwisata yang akan dilaksanakan melibatkan seluruh para pelaku usaha guna untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dan meningkatkan kapasitas sumberdaya yang ada, dan kegiatan yang di lakukan selam 3 hari.

Hal yang senada juga dikatakan oleh informan terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata pada aspek perencanaan ( planning) berikut pemaparannya:

*“dalam kegiatan pelatihan sertifikasi usaha kita libatkan semua para pelaku usaha dan pengusaha wisata yang bergerak di bidang usaha jasa akomodasi, transportasi, dan juga galanggang olahraga daerah, agar pariwisata selayar dapat memberikan pelayanan pada wisatawan”  
(AR, Seksi Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 13 mei 2018)*

Dari informasi yang diperoleh penulis dari informan bahwa dalam kegiatan pelatihan usaha pariwisata semua pelaku usaha dan pengusaha wisata itu dengan adanya kegiatan tersebut akan mendidik kesiapan pelaku wisata dalam menyambut dan menerima kunjungan wisatawan.

Dari tiga hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memilih program untuk pembinaan usaha ada beberapa yang program melakukan pelatihan pemandu wisata, pelatihan pelayanan hotel dan restoran serta pelatihan sertifikasi usaha, yang dimana disetiap kegiatan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) Hari. Dan program prioritas Dinas Pariwisata adalah untuk menjadikan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di semua kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas Pariwisata itu melibatkan semua pelaku usaha yang dimana seperti pengusaha jasa transportasi, akomodasi dan juga galanggang olahraga, yang dengan harapan nantinya dapat memberikan pelayanan dan siap dikunjungi oleh wisatawan baik lokal (domestik) maupun manca Negara.

c. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau lembaga untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang, atau juga dapat di katakan Anggaran sebagai alokasi dalam pembiayaan kegiatan/ program yang akan di alokasikan pada kegiatan

Penulis melakukan Wawancara terkait manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata pada aspek perencanaan (planning), berikut pemaparannya:

*"dines pariwisata dimana setiap mengadakan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kepariwisataan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan anggaran tersebut diambil dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU)"*  
(NR, Sekertaris sub bagian Hukum,Perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 13 Mei 2018 )

Dari informasi yang di peroleh penulis dari informan bahwa dimana dines pariwisata dalam melakukan kegiatan itu semata-mata untuk kemajuan kepariwisataan kabupaten kepulauan selayar, dan setiap kegiatan yang diadakan itu membutuhkan operasional yang sangat tidak sedikit. Dimana pengalokasian anggarannya diambil dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan anggaran yang kemudian digunakan dalam kegiatan tersebut yang diadakan oleh dines pariwisata.

Pendapat senada diperoleh penulis dari informan terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek perencanaan, berikut pemaparannya:

*"Dinas pariwisata setiap melakukan kegiatan dalam rangka memajukan kepariwisataan terkadang mengalami kendala, dimana kurangnya kaus atau anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan kepariwisataan Seperti kegiatan kordinasi persiapan pembentukan (KEK) yang sebesar Rp. 50.000.000 pada anggaran perubahan''(AR,Seksi Pengembangan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 13 mei 2018)*

Dari informasi yang didapat penulis dari informan bahwa dines pariwisata itu mengalami kadang kesulitan dalam menjalankan program atau kegiatan dalam rangka untuk memajukan kepariwisataan daerah kabupaten kepulauan selayar, di karenakan minimnya anggaran yang dialokasikan. imlementor kadang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan kepariwisataan kabupaten kepulauan selayar.

Dari dua hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap informan penulis dapat menyimpulkan bahwa rencana anggaran yang kemudian di alokasikan untuk kegiatan itu sangat minim dan terbatas untuk pengembangan kepariwisataan Kabupaten kepulauan selayar. dan anggaran yang digunakan setiap kegiatan itu diambil dari anggaran Dana Alokasi Umum ( DAU ), dan diperuntukkan pengimplementasian program kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### d. Prosedur

Prosedur merupakan sebagai ukuran cara dalam melakukan kegiatan atau pedoman dalam menjalankan kegiatan atau pengimplementasian program dalam sebuah organisasi atau lembaga pemerintahan.

Prosedur serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama,

Penulis melakukan Wawancara terkait manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata pada aspek perencanaan (planning), berikut pemaparannya:

*"Disemua kegiatan yang dilakukan Dinas Pariwisata itu memiliki prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan atau program yang diamanahkan untuk dilaksanakan kemudian" (RM, Seksi Bidang destinasi pariwisata Dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 13 mei 2018)*

Dari informasi yang didapat penulis dari informan bahwa dalam perencanaan pengimplementasian kebijakan atau kegiatan kepariwisataan itu sudah barang pasti memiliki prosedur, karna saat melakukan kegiatan itu dibutuhkan petunjuk atau pedoman agar kegiatan tersebut tidak menemui kendala dalam pengimplementasiannya.

Pendapat senada juga diperoleh penulis dari informan terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek perencanaan (planning) berikut pemaparannya:

*"dalam pelaksanaan Program tentu kami memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) karena kegiatan tidak akan berjalan optimal jika tidak memiliki Standar Operasional Prosedur, itusama halnya kita melakukan perjalanan wisata tanpa peta. Jadi pasti kami mempunyai SOP saat melaksanakan program dan kami membuat pelaporan kegiatan sebagai pertanggung jawaban" (AB, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 13 Mei 2018 )*

informasi yang diperoleh penulis dari informan terkait pembinaan usaha pariwisata Dinas Pariwisata bahwa dalam pengimplementasian program sudah barang tentu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan membuat laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggung jawaban karna kegiatan yang dilakukan pastilah tidak akan berjalan sempurna dan tidak akan memncapai sasaran dan tujuannya.

Dari dua hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah pedoman dalam pelaksanaan semua kegiatan dan kegiatan yang dilakukan akan dibuatkan pelaporan sebagai pertanggung jawaban yang dilakukan Dinas Pariwisata dan agar kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata terimplementasikan melainkan kegiatan yang dilaksanakan itu mendapat sasaraannya agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

Pada hakekatnya perencanaan merupakan penentuan sebuah tujuan utama bersama cara-cara untuk menentukan tujuan tersebut. Dimana dalam kepariwisataan perencanaan tidak terlepas dari segala aspek yang dimana berhubungan dengan pariwisata, dengan demikian perencanaan kepariwisataan mencakup seluruh jaringan yang berkaitan pariwisata yang dimana diantaranya adalah kalangan pemerintah (vertikal maupun horisontal), para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat umum.

Perencanaan begitu penting dalam pembinaan usaha pariwisata, hal ini dikarenakan perencanaan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan

pembinaan usaha pariwisata, sebaga sarana untuk menerawan atau memprediksikan yang dimana akan timbul kemungkinan diluar dugaan sekaligus merupakan alternatif untuk pemecahannya. Dimana sebagai sarana untuk menggerakkan penyelenggara pariwisata sehingga mencapai tujuannya, dimana mewujudkan usaha pariwisata secara efektif dan efisien, dan juga sebagai barometer tingkat keberhasilan usaha pariwisata sebagai upaya pengawasan dan evaluasi dalam hal memberikan feedback atau umpan balik terhadap penyelenggara selanjutnya.

Dari hasil yang diperoleh peneliti terkait Planning ( perencanaan) Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan selayar akan menjadikan Selayar sebagai ikon wisata di Provinsi Sulawesi Selatan serta berusaha agar 70% usaha yang ada itu tersertifikasi, Dinas Pariwisata dalam merencanakan Pelatihan usaha dan Pelatihan SDM, inenaruh harapan agar Kabupaten Kepulauan Selayar siap menerima kedatangan para wisatawan dan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memilih program untuk pembinaan usaha adalah pelatihan pemandu wisata, pelatihan pelayanan hotel dan restoran, serta pelatihan sertifikasi usaha dan lain-lain. kegiatan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) Hari berturut-turut melibatkan semua pelaku usaha yang dimana seperti pengusaha jasa Transportasi, Akomodasi dan juga Galanggang Olahraga. program prioritas Dinas Pariwisata adalah untuk menjadikan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). yang dengan

harapan nantinya dapat memberikan pelayanan dan siap dikunjungi oleh wisatawan baik lokal (domestik) maupun manca Negara.

Dinas Pariwisata masi mendapat kendala dimana minimnya Alokasikan Anggaran terbatas untuk pelatihan usaha pariwisata dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten kepulauan selayar. Anggaran yang digunakan setiap kegiatan itu diambil dari anggaran Dana Alokasi Umum ( DAU ), dan diperuntukkan pengimplementasian program kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar. sementara Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah pedoman dalam pelaksanaan semua kebijakan atau kegiatan yang dilakukan Dines Pariwisata agar kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata terimplementasikan melainkan kegiatan yang dilaksanakan itu mendapat sasarannya agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

## **2. Organising (pengorganisasian) Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Organizing atau Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan-hubungan dengan yang lain dan juga tanpa menetapkan tugas-tugas untuk masing-masing unit untuk tugas tertentu. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen atau pembinaan yang sangat penting karena pengorganisasian akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi atau instansi baik yang dimana berupa sumber daya manusia, maupun sumberdaya lainnya untuk mengarah pada tercapainya tujuan, agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif.

Menurut George R. Terry dalam (Sukarna 2011: 38) organizing merupakan hal yang sangat kritis ialah sebagai pengharmonisasikan kelompok dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai) terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik bagi keperluan kerja dengan pelaksanaan setiap kegiatan.

Organising merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan pembinaan usaha pariwisata, sebab Organizing yang baik akan memudahkan pekerjaan atau pengimplementasian kegiatan dalam urusan kerjasama antar sektor atau bagian yang terlibat dalam kegiatan Pembinaan Usaha Pariwisata, karna dalam pengorganisasian kegiatan yang dilakukan adalah Staffing ( penempatan staf) dan pemaduan semua sumberdaya, staffing sangat penting dalam pengorganisasian karna menempatkan SDM yang memiliki kualitas dan kapabilitas tinggi ditempat yang tepat. Maka perlujuga mengkoordinasikan dan mendukung seluruh potensi tersebut agar bekerja secara sinergik untuk pencapaian tujuan.

Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh Dinas pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pengorganisasian pembinaan untuk mencapai tujuan secara efektif agar kebijakan itu tepat sasaran, dengan begitu para imlementor tidak mendapatkan masalah dalam mengaktualkan kebijakan yang diberikan.

a. Sumberdaya

Sumberdaya suatu nilai atau potensi yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, untuk pelaksanaan kebijakan dan menyesuaikan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Penulis melakukan Wawancara pada Informan terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata pada aspek Organizing (pengorganisasian) berikut pemaparannya:

*"Dalam pengimplementasian program pembinaan usaha pariwisata kami telah ada pembagian tugas di semua program yang akan kami laksanakan, agar program yang kami jalankan itu dapat berjalan dengan efektif dan efisien" (NR, Sekertaris sub bagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 22 mei 2018)*

Berdasarkan informasi dari informan Dines Pariwisata telah melakukan pembagian tugas dari setiap program yang ada di Dinas Pariwisata hal agar pelaksanaannya dapat efektif dan efisien atau pembagian tugas dilakukan agar menghindari akan adanya masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

Pendapat senada didapatkan Penulis dalam melakukan wawancara pada informan terkait Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata pada aspek pengorganisasian, berikut pemaparannya:

*"untuk pembinaan usaha pariwisata sendiri sebenarnya ada dua bidang yang terlibat disini, usahanya masuk di bidang destinasi di seksi pengembangan industri pariwisata dan bidang pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan di Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, yang menangani itu untuk melakukan pengembangan keterampilan para kariawan/ pengusaha pariwisata agar usaha pariwisata dapat meningkat, (MZ, Kabid Pengembangan SDM dan kelembagaan, Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 22 mei 2018)*

Berdasarkan informasi yang kemudian didapatkan oleh peneliti dari informan bahwa Dines Pariwisata kabupaten kepulauan selayar, dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha pariwisata ada dua bidang yang memiliki peran penting dalam peningkatan usaha pariwisata, dimana kedua bidang tersebut saling bekerjasama yaitu bidang destinasi di seksi pengembangan industri pariwisata dan bidang pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan di Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk melakukan pembinaan usaha dan keterampilan pelaku usaha pariwisata.

Dari dua informasi yang didapatkan oleh penulis terkait pembinaan usaha pariwisata dalam aspek Organizing dapat disimpulkan bahwa didalam Dines Pariwisata itu telah dilakukan pembagian tugas dalam melakukan kegiatan pembinaan usaha pariwisata yang akan saling bekerjasama dimana pembinaan usahanya masuk di bidang destinasi di seksi pengembangan industri pariwisata dan bidang pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan di Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, yang menangani itu untuk melakukan pengembangan keterampilan para kariawan/ pengusaha pariwisata agar usaha pariwisata dapat meningkat dikabupaten selayar.

b. Pelimpahan wewenang

Pelimpahan wewenang artinya sebuah proses pengalihan tugas pada orang lain yang sah atau terlegitimasi dalam berbagai aktifitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan pembinaan usaha pariwisata kabupaten selayar.

Pelimpahan wewenang itu dilakukan agar sebenarnya agar efektifitas dapat dilaksanakan dengan baik

penulis melakukan wawancara terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek Organizing, berikut pemaparannya:

*"Dalam pembinaan Usaha pariwisata kami telah memberikan wewenang terhadap dua bidang yang akan melakukan kegiatan tersebut dimana ada bidang destinasi di seksi pengembangan industri pariwisata dan bidang pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan di Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, bidang inilah yang akan melakukan kegiatan pembinaan usaha pariwisata diselayar" (AB, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 27 mei 2018)*

Dari informasi yang diperoleh penulis dari informan bahwa dimana Dines pariwisata telah melakukan pembagian wewenang kepada 2 (dua) bidang dan ( dua ) seksi dimana keduanya adalah bidang destinasi di seksi pengembangan industri pariwisata dan bidang pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan di Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Pendapat yang senada di peroleh penulis terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata pada aspek Organizing, berikut pemaparannya:

*"pola kerjasama kedua bidang selama ini kita berjalan dalam pembinaan usaha pariwisata dan kami juga membangun kerjasama dengan bumdes dengan tujuan peningkatan SDM utamanya desa yang punya potensi wisata karna mau atau tidak ketika kita tidak melakukan hubungan lintas sektor maka yakin saja tidak akan bisa maju kepariwisataan di selayar" (MZ, Bidsng Pengembangan SDM dan kelembagaan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 27 mei 2018)*

Informasi yang diperoleh penulis dari informan bahwa pola kerjasama dari kedua bidang dan seksi harus berjalan terus dan komunikasi lintas sektor

dengan bumdes yang memiliki potensi wisata agar dapat melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam hal kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari dua informasi yang didapatkan oleh penulis terkait pembinaan usaha pariwisata pada aspek Organizing, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pariwisata telah membagi porsi tugas dan wewenang guna untuk mengefektifkan kegiatan sesuai rencana dan membangun komunikasi lintas sektor seperti BUMDES yang memiliki potensi Wisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Organizing atau Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa adanya hubungan-hubungan dengan yang lain dan juga tanpa menetapkan tugas-tugas untuk masing-masing unit untuk tugas tertentu. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen atau pembinaan yang sangat penting karena pengorganisasian akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi atau instansi baik yang dimana berupa sumber daya manusia, maupun sumberdaya lainnya untuk mengarah pada tercapainya tujuan, agar kegiatan dapat terlaksana dengan efektif.

Dinas pariwisata telah melakukan pembagian wewenang kepada 2 (dua) bidang dan ( dua ) seksi dimana keduanya adalah bidang destinasi di seksi pengembangan industri pariwisata dan bidang pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan di Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Dinas Pariwisata telah membagi porsi tugas dan wewenang guna untuk mengefektifkan kegiatan sesuai rencana dan membangun komunikasi lintas sektor seperti

BUMDES yang memiliki potensi Wisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **3. Actuating (pengerarakan) manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Actuating merupakan salasatu bagian yang amat penting dalam sebuah program atau kegiatan, perencanaan dan pengorganisasian tidak akan bermakna jika tak di ikuti dengan pelaksanaan kerja untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Dimana sumberdaya manusia yang ada harus di optimalkan untuk mencapai Visi, Misi dan program kerja lembaga. Dalam hal ini pelaksanaan kerja harus seauai dan sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali ada hal-hal yang sifatnya khusus sehingga harus dilakukan penyesuaian.

Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung pada planning dan organising yang baik, melainkan juga tergantung pada penggerakan, perencanaan dan organising hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya penggerakan yang terarah pada sasaran yang dituju. Pergerakan tanpa plening tak akan berjalan maksimal.

Menurut George R. terry dalam (Sukarna 2011:) membangkitkan dan mendaorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh Dines pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki actueting pembinaan untuk mencapai tujuan secara efektif agar kebijakan itu tepat sasaran, dengan begitu para imlementor tidak mendapatkan masalah dalam mengaktualkan kebijakan yang diberikan.

merupakan suatu tindakan untuk mengusahakan semua anggota atau stecholder berusaha untuk mencapai sasaran yang sudah sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi.

a. Supervisi

Supervisi dapat diartikan sebagai seseorang atau pegawai yang dimandati tugas sebagaimana ia diberi kuasa dan wewenan untuk melakukan perintah kepada rekan kerja yang dimana berada dibawah dari jabatannya untuk melakukan pembinaan usaha pariwisata di kabupaten kepulauan selayar.

penulis melakukan wawancara terkait manajemen pembinaan usha pariwisata dalam aspek Actueting, berikut pemaparannya:

*"Kami telah bekerja dalam sesuai tugas dan fungsi kami untuk melakukan kegiatan atau program yang diamanahkan Dinas Pariwisata", (AR, Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 30 mei 2018 )*

Berdasarkan data yang kemudian didapatkan oleh peneliti dari informan bahwa Dines Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar telah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melakukan atau mengimplementasikan tugas dan fungsi yang diamanahkan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pendapat senada diperoleh penulis dari informan terkait pembinaan usaha pariwisata pada aspek Actueting, berikut pemaparannya:

*"kami bekerja sesuai tugas dan fungsi kami untuk memajukan kepariwisataan kabupaten kepulauan selayar Dines pariwisata telah banyak melakukan kegiatan yang akan mendorong kemajuan kepariwisataan selaya" (SN, Seksi Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Dinas Pariwisata Kabupaten selayar, 30 mei 2018)*

infomasi yang diperoleh peneliti dari informan bahwa dimana para stecholder atau pegawai Dines pariwisata telah melakukan pekerjaan dan fungsinya di setiap pengimplementasian program dan bertujuan agar dimana program itu berjalan dengan baik dan memajukan kepariwisataan selayar.

dari dua informasi yang ada terkait pembinaan usaha pariwisata dalam aspek Actueting penulis dapat menyimpulkan bahwa stek holder Dinas Pariwisata dalam melakukan kegiatan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. bahwa dimana para stecholder atau pegawai Dines pariwisata telah megimplementasikan program dan bertujuan agar dimana program itu berjalan dengan baik dan memajukan kepariwisataan selayar

#### b. Disiplin

Disiplin ialah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya atau dapat diartikan juga sebagai usaha untuk memananmkan nilaiataupun pemaksaan agar dimana subjek dapat memiliki kemampuan untuk mematuhi sebuah peraturan

penulis melakukan wawancara terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek Actueting, berikut pemaparannya:

*"Dalam menjalankan tugas yang diberikan semua pegawai dines pariwisata selalu taat pada atura dan perundang undangan yang berlaku" (RM, Bidang destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, 30 mei 2018)*

Dari informasi yang diperoleh penulis dari informan terkait pembinaan usaha pariwisata dalam aspek Actueting adalah dimana semua pegawai atau stec holdes selalu taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya sesuai mekanisme atau peraturan yang berlaku

Pendapat senada diperoleh penulis dari informan, terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata pada aspek Actueting, berikut pemaparannya

*"Dalam melakukan kegiatan semua pegawai Dinas Pariwisata ini selalu patuh pada mekanisme yang ada dan kami bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya kami, sebab tanpa mengikuti peraturan semua kegiatan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan memperoleh apa yang di inginkan" (AB, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 30 Juni 2018)*

Informasi yang di peroleh penulis dari informan terkait pembinaan usaha pariwisata pada aspek Actueting adalah dimana semua pegawai selalu patu terhadap mekanisme yang ada, karna tanpa kepatuhan pada aturan semua kegiatan tidak akan memperoleh hasil yang di inginkan atau diharapkan.

Dari dua hasil yang di peroleh peneliti maka dapat di simpulkan bahwa dimana semua pegawai atau stecholdes selalu taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya sesuai mekanisme atau peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab

pada tugas dan fungsinya, karna tanpa kepatuhan pada aturan semua kegiatan tidak akan memperoleh hasil yang di inginkan atau diharapkan. Perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pada hakekatnya Actuating merupakan salasatu bagian yang amat penting dalam sebuah program atau kegiatan, perencanaan dan pengorganisasian tidak akan bermakna jika tak di ikuti dengan pelaksanaan kerja untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Dimana sumberdaya manusia yang ada harus di optimalkan untuk mencapai Visi, Misi dan program kerja lembaga. Dalam hal ini pelaksanaan kerja harus seauai dan sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali ada hal-hal yang sifatnya khusus sehingga harus dilakukan penyesuaian. Tercapainya tujuan bukan hanya tergantung pada planning dan organising yang baik, melainkan juga tergantung pada pergerakan, perencanaan dan organising hanyalah merupakan landasan yang kuat untuk adanya pergerakan yang terarah pada sasaran yang dituju. Pergerakan tanpa plening tak akan berjalan maksimal.

Actuating dibutuhkan dimana semua pegawai atau stecholdes selalu taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya sesuai mekanisme atau peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsinya, karna tanpa kepatuhan pada aturan semua kegiatan tidak akan memperoleh hasil yang di inginkan atau diharapkan. Perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

#### **4. Controlling (pengawasan) Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

controlling adalah salah satu contoh manajemen yang melakukan penilaian bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat kita arahkan kepada sesuatu yang benar, dengan harapan agar tujuan dapat tercapai seperti apa yang telah ditetapkan pada perencanaan.

Controlling memiliki peranan dan kedudukan yang penting sekali dalam sebuah manajemen, mengingat memiliki fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu tertib, terarah atau tidak. Walaupun pelanning, organising acteting baik, tapi apabila pelaksanaan kerja tidak terukur, tertip dan terarah, maka tujuan yang dahulunya ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tujuan kepada sasaraannya, hingga tujuan pada sasaraannya dapat tercapai.

Menurut George R. Terry (Sukma 2011: 110) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang harus dilakukan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai rencana yaitu selaras dengan standar ( ukuran).

##### **a. Standar (ukuran)**

Standar dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan proses penilaian pada kegiatan atau program pelatihan atau pembinaan usaha pariwisata yang hendak dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar

penulis melakukan wawancara terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek controlling, berikut pemaparannya:

*"pengawasan yang kami lakukan disetiap kegiatan pembinaan usaha pariwisata itu kami membentuk tim terpadu bersama Dines Penanaman modal dalam mengontrol kegiatan"(NR, Sekeriaris sub bagian Hukum, Perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata Kabupaten selayar, 15 juni 2018)*

Berdasarkan informasi yang di dapat penulis dari informan bahwa dimana Dines Pariwisata dan Dines Penanaman modal telah membentuk tim terpadu agar melakukan pengontrolan terkait kegiatan pembinaan usaha pariwisata yang didakan.

Pendapat senada didapatkan penulis dari informan terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek controlling, berikut pemaparannya:

*" dalam pelaksanaan pembinaan usaha kami melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya" (RM, Bidang destinasi pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 15 juni 2018)*

Informasi yang didapat penulis dari informan bahwa dimana dalam pengawasan yang dilakukan dines pariwisata dan dines penananman modal itu melakukan pengawasan sesuai standar-standar prosedur yang sebelumnya di tetapkan.

Dari dua informasi yang diperoleh penulis terkait pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata dines penananman modal dan dines pariwisata membentuk tim terpadu dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk perkembangan kepariwisataan dan dimana juga dari kedua

dines tersebut melakukan pengawasan dengan menyesuaikan standar-standar pelaksanaan sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat diartikan suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang, dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan jika perencanaan sudah dianggap siap.

penulis melakukan wawancara terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek controlling, berikut pemaparannya:

*"Dalam pelaksanaan kegiatan dilaku pengawasan dan diberikan bimbingan teknis maupun bimbingan operasional baik agar pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata tidak mendapatkan kendala" (MZ, Bidsng Pengembangan SDM dan kelembagaan Dinas pariwisata kabupaten kepulauan selayar, 26 juni 2018)*

Dari informasi yang di dapat olen penulis dari informan adalah dimana dalam kegiatan pelaksanaan pembinaan pariwisata dilakukan dengan baik dengan pengawasan dan memberikan bimbingan teknis dan operasional agar dimana dalam pengimplementasian atau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan itu tidak mengalami kendala

Pendapat senada didapatkan peneliti dari informan terkait manajemen pembinaan usaha pariwisata dalam aspek controlling, berikut pemaparannya:

*"dalam pelaksanaan pengawasan kita tidak keluar dari yang sudah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya, karna hanya akan menimbulkan masalah dalam proses pelaksanaannya nanti dan kegiatan tersebut akan dilaporkan secara tertulis" (NR, Sekertaris sub bagian*

*Hukum, Perencanaan dan pelaporan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar 26 juni 2018).*

Informasi yang diperoleh penulis dari informan dalam pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata stekholder pelaksana mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam perencanaan terkait yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena bilamana dilakukan dengan keluar dari apa yang ditetapkan haya akan mendapat masalah atau kendala dalam pelaksanaan.

Dari dua informasi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dines pariwisata dalam melakukan pelaksanaan program pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan oleh para staf/ pegawai itu sangat baik dan dimana dalam pelaksanaannya itu tidak keluar dari apa yang yang sudah dtetapkan pada perencanaan sebelumnya.

Controlling memiliki peranan dan kedudukan yang penting sekali dam sebuah manejemen, mengingat memiliki fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu tertib, terarah atau tidak. Walaupun pelanning, organising acteting baik, tapi apabila pelaksanaan kerja tidak terukur, tertip dan terarah, maka tujuan yang dahulunya ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunya fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tujuan kepada sasarnya, hingga tujuan pada sasarnya dapat tercapai.

pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata dinas penanaman modal dan dines pariwisata membentuk tim terpadu dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk penerbitan TDUP dan

Sertifikasi Usaha, dimana juga dari kedua dines tersebut melakukan pengawasan dengan menyesuaikan standar-standar pelaksanaan sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya Dinas pariwisata dalam melakukan pelaksanaan program pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan oleh para staf/ pegawai itu sangat baik dan dimana dalam pelaksanaannya itu tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya.

#### **5. Pebinaan usaha pariwisata**

Pembinaan merupakan sebuah langkah perbaikan dalam usaha pariwisata dengan tujuan tersertifikasinya usaha pariwisata sehingga usaha pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, kegiatan yang pelatihan dan pembinaan usaha pariwisata bertujuan agar dimana para pelaku usaha pariwisata dapat mempersiapkan diri dalam pejualan barang dan jasa pada wisatawan yang berwisata di kabupaten kepulauan selayar. Ada beberapa manfaat dalam kegiatan pembinaan usaha pariwisata menjadikan usaha pariwisata lebih baik, usaha pariwisata bisa mendapatkan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), dan takkala pentingnya adalah usaha pariwisata dapat bersaing dengan daerah lain dalam penjualan barang dan jasa.

Usaha pariwisata merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan/ mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha saranam pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi saranwisata dengan kata lain sadalah usaha penyelenggaraan berupa

usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata. Usaha pariwisata secara menyeluruh dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, tetapi tidak diibaratkan sebagai pabrik yang harus mengolah barang mentah menjadi barang jadi, serta ada produknya. Industri pariwisata ialah semua usaha-usaha yang dapat dinikmati semua wisatawan sejak awal mulai proses ketertarikan untuk berwisata, dan menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai atau berujung pada proses akhir wisatawan tersebut pulang dan menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian mengenangnya.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya mengenai Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dimana sudah didukung oleh Perda Nomor 8 Tahun 2011 yang dimana bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan di sektor Usaha pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, serta memajukan taraf kehidupan ekonomi Masyarakat setempat Dan juga meningkatkan APBD. Namun dilihat dari realitasnya Pembinaan Usaha pariwisata tersebut sudah cukup baik, hal ini dapat kita lihat dari fungsi-fungsi Manajemen oleh berikut:

#### **1. Planning (Perencanaan) Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dari hasil yang diperoleh peneliti terkait Planning ( perencanaan) Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar akan menjadikan Selayar sebagai ikon wisata di Provinsi Sulawesi Selatan serta berusaha agar 70% usaha yang ada itu tersertifikasi, Dinas Pariwisata dalam merencanakan Pembinaan usaha dan Pelatihan SDM, menaruh harapan agar Kabupaten Kepulauan Selayar siap menerima kedatangan para wisatawan dan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dalam memilih program untuk pembinaan usaha adalah pelatihan pemandu wisata, pelatihan pelayanan hotel dan restoran, serta pelatihan sertifikasi usaha

dan lain-lain. kegiatan tersebut dilakukan selama 3 (tiga) Hari berturut-turut melibatkan semua pelaku usaha yang dimana seperti pengusaha jasa Transportasi, Akomodasi dan juga Galangang Olahraga. program prioritas Dinas Pariwisata adalah untuk menjadikan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). yang dengan harapan nantinya dapat memberikan pelayanan dan siap dikunjungi oleh wisatawan baik lokal (domestik) maupun manca Negara.

Dinas Pariwisata masi mendapat kendala dimana minimnya Alokasikan Anggaran terbatas untuk pelatihan usaha pariwisata dan pengembangan kepariwisataan Kabupaten kepulauan selayar. Anggaran yang digunakan setiap kegiatan itu diambil dari anggaran Dana Alokasi Umum ( DAU ), dan diperuntukkan pengimplementasian program kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar. sementara Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sebuah pedoman dalam pelaksanaan semua kebijakan atau kegiatan yang dilakukan Dines Pariwisata agar kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata terimplementasikan melainkan kegiatan yang dilaksanakan itu mendapat sasarannya agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

## **2. Organising (pengorganisasian) Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dines pariwisata telah melakukan pembagian wewenang kepada 2 (dua) bidang dan ( dua ) seksi dimana keduanya adalah bidang destinasi di seksi pengembangan idustri pariwisata dan bidang pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan di Seksi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Dinas

Pariwisata telah membagi porsi tugas dan wewenang guna untuk mengefektifkan kegiatan sesuai rencana dan membangun komunikasi lintas sektor seperti BUMDES yang memiliki potensi Wisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **3. Actuating (pengerakan) Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Actuating dibutuhkan dimana semua pegawai atau stekholdes selalu taat dan patuh dalam menjalankan tugasnya sesuai mekanisme atau peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab pada tugas dan fungsinya, karna tanpa kepatuhan pada aturan semua kegiatan tidak akan memperoleh hasil yang di inginkan atau diharapkan. Perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya

### **4. Controlling (pengawasan) Manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar**

pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata dines dines penanaman modal dan dines pariwisata membentuk tim terpadu dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk penerbitan TDUP dan Sertifikasi Usaha, dimana juga dari kedua dines tersebut melakukan pengawasan dengan menyesuaikan standar-standar pelaksanaan sesuai apa yang telah disepakati sebelumnya Dines pariwisata dalam melakukan pelaksanaan program pembinaan usaha pariwisata yang dilakukan oleh para staf/ pegawai itu sangat baik dan dimana dalam pelaksanaanya itu tidak keluar dari apa yang sudah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya.

## B. SARAN

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dimana melalui Dinas Pariwisata harus menjalankan manajemen Pembinaan Usaha Pariwisata sesuai dengan apa yang kemudian telah di amanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dimana dalam pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata dapat berjalan Optimal.

Adapun Peneliti memberikan masukan atau saran yang berkaitan Hasil Penelitian, yakni :

1. Diharapkan dimana pemerintah kabupaten kepulauan selayar dapat menjalankan program sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
2. Diharapkan pemerintah kabupaten kepulauan selayar agar menambah Alokasi Anggaran Pembinaan Usaha Pariwisata disetiap pelaksanaan Pembinaan Usaha Pariwisata.
3. Diharapkan Dinas Pariwisata melakukan pembinaan interen (insitu) pada stace holder dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ( TUPOKSI )
4. Diharapkan seluruh SKPD yang terlibat Dalam pembinaan usaha pariwisata turut andil dalam kegiatan tersebut.
5. Diharapkan semua yang terlibat dalam Perda tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi demi menciptakan Kemajuan Usaha Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sentral Pariwisata Unggulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- I Gusti, Bagus Rai Utama (2016), *pengantar industri pariwisata, tantangan dan peluang bisnis kreatif*. Yogyakarta; Deepublis
- Dicky, Sumarsono CHA (2014) *dahsyatnya bisnis hotel di indonesia, smart strategy, high revenue*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Pandit, Nyonya s. (2002) *ilmu pariwisata sebuah pengantar perdana*. Jakarta. PT . parady paramita.
- James j. Spillane. (1991). *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*. kanisius
- Firmansyah Rahim. (2012). *Pedoman kelompok sadar wisata*. Jakarta:Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif
- Yoeti, oka A.(1983). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa
- A.J, Muljadi. (2012). *Kepariwisata dan perjalanan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyandaru.Trianto.(2015). *Kebijakan dan Langkah-langkah Pengembangan Pariwisata Indonesia*. Rayendar
- Dr Rochajat. Harun . Med . (2008), *Peran Perhotelan dalam Kepariwisata*an redaksi kabar indonesia
- Leni hasni muliyani (2015) *peran dines kebudayaan dan parawisata dalam peningkatan wisatawan domestik*. Makassar. Skripsi
- C.S.T Kansil(1984), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara,
- A.J, Muljadi. (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Pandit, nyonya S. (2002). *Ilmu parawisata sebuah pengantar perdana*. Jakarta : Pt. Prandy paramita
- Moleong, J. Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Prawirosentono, Suryadi. (1999). *Manajemen SDM Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi. Kompetitif dalam Perdagangan Bebas Dunia*. Yogyakarta. BPFE

Hamiyah, nur (2015). *Pengantar Manajemen Pendidikan*. Prestasi Pustaka copyringht. jakarta

Michael, Huberman.(1992). *Analisa Data Kualitatif Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press. Jakarta

Karyono, A.H. 1997. *Kepariwisataaan*. PT. Grasindo. Jakarta.

Nanang fattah, (2009), *landasan manenemen pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung

R.Terry, George dan Leslie W.Rue.(2010) *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta

R.Terry, George. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta

#### **Undang – undang**

Undang- undang. Nomot. 10 tahun 2009 tentang *keparawisataan*. Repoblik Indonesia. 09 februari 2018

Panpres No. 6 Tahun 1959 ini didasarkan atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. 31 juni 2018

Perda nomor 12 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah dan mekanisme kerja daerah kabupaten kepulauan selayar. 11 februari 2018

Perbup Nomor 68 Tahun 2009 tentang susunan organisasi dan formasi Dinas Kepariwisataaan Kabupaten Kepulauan Selayar. 26 juni 2018

Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan dimana menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.27 juni 2018

Perda. Nomor 7 tahun 2011 tentang *rancangan induk pengembangan parawisata*. Kab. Kep. Selayar. 08 februari 2018

Perda. Nomor. 8 tahun 2011 tentang *pembinaan usaha parawisata*.kab. kep. Selayar. . 08 februari 2018

#### **Sumber lain**

<http://www.kompasiana.com/sofyan.ym/keterkaitan-usaha-perhotelan-dan-pariwisata>. senin tanggal. 26 maret 2018

[http://intanghina.wordpress.com/2008/04/28/pengaruh budaya perusahaan-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan](http://intanghina.wordpress.com/2008/04/28/pengaruh-budaya-perusahaan-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan) sbtu 30.maret 2018

<http://jenishotel.info/hubungan-industri-perhotelan-dengan-pariwisata> senin tanggal 26 maret 2018

<https://medium.com/@TERRAITB/poac-planning-organizing-actuating-and-controlling-manajemen-organisasi-ea982e20529> . Sabtu 28 juli 2018

<https://brainly.co.id/tugas/13696702> . Sabtu tanggal 28 juli 2018



LAMPIRAN

Ruangan bidang pengembangan SDM dan kelembagaan



Ruangan dostenasi pariwisata 2018P



Gedung pariwisata selayar dan struktur organisasi dinas pariwisata 2018





PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jln. Kemiri Nomor 27 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telp. (0414 ) 22447

Benteng, 15 Mei 2018

Nomor : 070/23/Kesbangpol/V/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di-  
Tempat

Mendasari surat dari Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, tanggal 11 Mei 2018, perihal keterangan telah melaksanakan kegiatan Penelitian bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Riswan Dani Putra  
NIM : 10561 04173 11  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Ujung Jampea  
No. Telp : 082291910666

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dengan judul "Pembinaan Usaha Pariwisata Perhotelan di Kabupaten Kepulauan Selayar".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

  
M. YUNAN MUBTOMPOBULU, S.T  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NRA19680521 199803 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS KEPARIWISATAAN**

Jl. Jend. Sudirman Nomor 4 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telp. ( 0414 ) 21725, Fax. (0414) 21725

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070/359 /V/2018/Dispar

Dasar : Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/31/Kesbangpol/V/2018, tanggal 03 Mei 2018.

**MEMBERIKAN IZIN**

Kepada :

Nama : Riswan Dani Putra  
No. Stambuk : 10561 04173 11  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur  
No. HP : 0822 9191 0666

Akan melaksanakan penelitian di Dinas Kepariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Judul "**Pembinaan Usaha Pariwisata Perhotelan di Kabupaten Kepulauan Selayar**" dari tanggal 05 Mei s.d 05 Juli 2018.

Dengan Ketentuan:

1. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
2. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyerahkan copy hasil penelitian kepada Kepala Dinas Kepariwisata
4. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan di atas.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Benteng 07 Mei 2018

KEPALA DINAS

**ANDI ABDURRAHMAN, SE., M.Si.**

NIP. 19670526 199703 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 22447  
Benteng Selayar

Benteng, 03 Mei 2018

Nomor : 070/31/Kesbangpol/V/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kepariwisata  
Kabupaten Kepulauan Selayar

Di-  
Tempat

Mendasari Surat Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 508/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018, tanggal 24 April 2018, perihal izin penelitian, Disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Riswan Dani Putra  
No. Stambuk : 10561 04173 11  
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Ujung Kec. Pasimasunggu Timur  
No. HP : 082291910666

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "Pembinaan Usaha Pariwisata Perhotelan di Kabupaten Kepulauan Selayar." Yang akan dilaksanakan mulai dari 05 Mei s/d 05 Juli 2018

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Kepulauan Selayar cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil " LAPORAN" kepada Bupati cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Demikian disampaikan atas bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK**

**M. YUNAN KRG. TOMPOBULU, ST**  
Pangkat : Pembina Tk I  
NIP. 19680521 199803 1 009



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : 508/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018

jumlah : 1 (satu) Rangkap Proposal

jenis : Permohonan Izin Penelitian

12 Sya'ban 1439 H

28 April 2018 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Kepulauan Selayar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Selayar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0698/FSP/A.1-VIII/IV/1439H/2018M tanggal 27 April 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RISWAN DARI PUTRA

No. Stambuk : 10561 04173 11

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pembinaan Usaha Pariwisata Perhotelan di Kabupaten Kepulauan Selayar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Mei 2018 s/d 5 Juli 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0698/FSP/A.1-VIII/IV/1439 H/2018 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksampul  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Riswan Dari Putra  
Stambuk : 10561 04173 11  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Lokasi Penelitian : Di Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar  
Judul Skripsi : "*Pembinaan Usaha Pariwisata Perhotelan di Kabupaten Kepulauan Selayar*"

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 27 April 2018

Dekan,  
Ub. Wakil Dekan I





# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221  
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

### SURAT KETERANGAN HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Nama : Riswan Dani Putra  
Nomor Stambuk : 10561 04178 11  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Penelitian : Pembinaan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. H. Mappamiring, M.Si (Ketua)	14/8 - 2018	
2	Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si	13/8 2018	
3	Abdul Kadir Adys, SH, MM	12/8 - 2018	
4	Haerana, S.Sos, M.Si	13/8 - 2018	

Makassar, 14/08/2018  
Mengetahui  
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si